

**ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**MUHAMMAD IMTIHAN  
NPM : 1321020036**

**JURUSAN SIYASAH**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

**ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBRANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**MUHAMMAD IMTIHAN  
NPM : 1321020036**

**JURUSAN SIYASAH**

**Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Drs. Maimun, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Oleh**  
**Muhammad Imtihan**

Maraknya tindak kejahatan terorisme mengatasnamakan Islam di penjuru dunia, menuntut berbagai pihak berpendapat sekaligus mengambil peran untuk mengatasinya. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, pasca dikoyak dengan bom Bali I dan beberapa ledakan lain, pemerintah Indonesia segera membutuk BNPT sebagai lembaga non kementerian yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002, pada peristiwa peledakan Bom Bali, tanggal 12 Oktober 2002, dari awal kehadirannya memang merupakan peraturan perundang-undangan yang cukup kontroversial dan mengundang suara prokontra dari berbagai kalangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sejak awal kelahirannya merupakan peraturan perundang-undangan yang cukup kontroversial dan mengundang suara prokontra dari berbagai kalangan masyarakat. Suara pro tentunya berasal dari pejabat pemerintahan serta kalangan dan tokoh intelektual yang terlibat langsung dalam perancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Sedangkan suara kontra umumnya muncul dari kalangan akademisi dan tokoh-tokoh LSM serta pejuang demokrasi yang menghawatirkan kehadiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan menjadi ancaman terhadap proses transisi di Indonesia serta menilai kepentingan politik dan ideologi Negara asing terutama Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dapat dirumuskan bagaimanakah analisis politik hukum Islam

terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan apakah kendala dan solusi dalam proses penegakan hukum terkait tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme serta untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan sistem penelitian kualitatif (studi pustaka), yakni suatu penelitian dengan objek utamanya adalah analisis Politik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Di Indonesia penanganan perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme, dan peran Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme serta sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi anggota kelompok teroris.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat : Jl. H. Endro Suramin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289**

**Judul Skripsi : ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR  
15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME**

**Nama : Muhammad Intihan**

**NPM : 1321020036**

**Jurusan : Siyash**

**Fakultas : Syariah**



**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung**

**Bandar Lampung, 26 April 2017**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

**Drs. Maimun, S.H., M.H.**

**NIP.19700901199703102**

**NIP.196003291987031003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyash**

**Drs. Susiadi, M.Sos.I**

**NIP. 195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat : J.E. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul: ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN  
2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME, disusun oleh Muhammad Imtihan, NPM.  
1321020036, Program Studi: Siyasa, telah diajukan dalam  
sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan  
Lampung. Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 9 Juni 2017.**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Drs. Susiadi A.S., M. Sos.I**

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M. Ag.**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.I.**

**Penguji II : Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag**

**Dekan Fakultas Syariah,**

**Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۚ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah : 8)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Semarang: CV.Toha putra, 1989), 488

### **PERSEMBAHAN**

Tiada yang Maha Pengsih dan Maha Penyayang selain engkau ya Allah. Syukur allhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah, saya bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini ku persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hi.suhanda dan ibunda Hj.kusmiyati S.Ag. betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku dan terima kasih atas segala dukungan moril maupun materil untukku selama ini.
2. Untuk adik-adikku tercinta Muhammad Tholib Zaqi, Muhammad Sulaiman Rasyid , dan Een Qurotul Aini yang selalu mendukungku serta membuat hari-hariku selalu tersenyum.
3. Untuk teman-teman almamaterku dan teman-teman seperjuanganku di kampus yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Mari kita lanjutkan perjuangan kita di luar sana.
4. Kepada ketua UKM persaudaraan setia hati terate yang selalu memberikan semangat
5. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung



### **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Sukoharjo pada 23 Mei 1992, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak Hi.Suhanda dan Ibu Hj.Kusmiyati S.Ag.

Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 7 Bandung Baru diselesaikan pada tahun 2005 - 2006 kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 1 Adiluwih diselesaikan pada tahun 2008-2009, dan Madrasah Aliyah Daarul Falah Serang- Banten diselesaikan pada tahun 2012-2013. Kemudian pada Tahun 2013 Terdaftar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum di UIN Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan hingga zaman kecerdasan/ kemajuan.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari akan kurang-kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, agar penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan dapat bermanfaat.

Selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil sehingga terselesaikanya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Maimun, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Drs. Susiadi, AS. M.Sos.I Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Frenki, M.S.I Selaku Sekertaris Jurusan Siyasa pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu dosen serta para staf karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama menimba Ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2013.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini

Ucapan terima kasih ini penulis iringi dengan do'a semoga bantuan dari semua pihak merupakan amal yang akan mendapat imbalan pahala dari Allah S.W.T.

Akhirnya penulis mengharapkan ridha dari Allah S.W.T. agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya Aamiin.

Bandar Lampung, Maret 2017  
Penulis,

**Muhammad Imtihan**  
NPM. 1321020036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I.PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11

### **BAB II.POLITIK HUKUM DAN TERORISME**

A. Pengertian dan Sejarah Politik Hukum Islam .....	13
B. Prinsip dan Teori Politik Hukum Islam .....	25
C. Kegunaan Kajian Politik Hukum Islam .....	35
D. Pengertian Terorisme dan Dalil Laranganya .....	41
E. Bahaya-bahaya Terorisme dan Dampaknya .....	50
F. Faktor-faktor terjadinya terorisme .....	51

### **BAB III.TERORISME DAN PERATURAN**

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Dasar Hukum Larangan Terorisme .....	59
1. Dalam Pandangan Hukum Islam .....	59
2. Dalam Pandangan Hukum Positif.....	63
B. Pemberantasan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.....	64



## **BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A.** Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ..... 71
- B.** Kendala-dan Solusi Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ..... 88

## **BAB V.PENUTUP**

- A.** Kesimpulan ..... 95
- B.** Penutup ..... 95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari judul.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah : Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme.

Agar tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah :

#### 1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>2</sup>

#### 2. Politik Hukum Islam

Abdul al-Wahhab Khallaf mendefinisikan politik hukum Islam, adalah suatu terma dan terjemahan dari siyasah Asy-Syar'iyah yang secara terminologis diartikan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas Sar'iyah dan pokok-pokok Sar'iyah yang bersifat umum, walaupun tidak ditetapkan di dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Brotowidjoyo, Mukayat, *Penulisan Karangan Ilmiah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001) h.76

<sup>3</sup> Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.78

Sedangkan Ibn Al-Qayyim membuat dengan terma politik Islam yang didefinisikan dengan perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, serta sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah menetapkan pula.<sup>4</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang Yang membahas tentang terorisme di mana Undang—Undang tersebut menjelaskan bahwa terorisme sangatlah dilarang di Indonesia. Apabila ada terorisme yang merajalela di Indonesia baik itu warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing akan mendapatkan sanksi tersendiri yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut.

### 4. Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.<sup>5</sup> Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.<sup>6</sup> Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab

---

<sup>4</sup> <http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/02/siyasah-politik-islam.html>, 02 Oktober 2016

<sup>5</sup> Erdianto Efendi, *HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar* (PT Refika Aditama: Bandung, 2011) h.109

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1* (Grafindo, Jakarta ,2002), h 69

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.<sup>7</sup>

## 5. Terorisme

Secara etimologi, terorisme memiliki kata dasar *terror*. Ia berasal dari bahasa Latin *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Bila merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teror dimaknai sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.<sup>8</sup> Secara terminologi mengartikan terorisme sebagai praktek-praktek tindakan terror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama politik).<sup>9</sup> Terorisme juga sebagai penggunaan kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai satu tujuan (terutama tujuan-tujuan politik). Tujuannya, untuk mempromosikan kepentingan politiknya, sehingga dunia internasional tahu apa yang mereka perjuangkan.<sup>10</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul diatas yaitu :

1. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum.
2. Diperlukannya norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparaturnya penegak hukum

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru, Bandung, 1990), h. 594

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1048

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 263

<sup>10</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 530



yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.

3. Diperlukan norma hukum yang progresif dan responsif. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.

### C. Latar Belakang Masalah

Masih segar dalam ingatan kita, peristiwa berdarah yang terjadi pada 12 Oktober 2002 silam. Sebuah catatan sejarah untuk kali pertama serangan bom bunuh diri (*suicide bomber*) terbesar terjadi di Indonesia<sup>11</sup>. Peristiwa yang terjadi di Paddy's Bar dan Sari Club<sup>3</sup> Legian, Kuta Bali tersebut menewaskan lebih kurang 202 nyawa manusia dan melukai ratusan lainnya<sup>12</sup>.

Berbagai pendapat pun mengemuka, mulai anggapan skenario Amerika, misi Australia menguasai Indonesia, bahkan sempat muncul pula anggapan bahwa Inteligen dan TNI berada di balik aksi teror bom itu,<sup>13</sup> hingga ditemukan fakta bahwa pelaku sekaligus dalang bom bunuh diri adalah kelompok teroris Jamaah Islamiyah.

Dalam waktu singkat, kepolisian bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* membentuk tim investigasi bom Bali. *Walhasil*, tim investigasi mampu menangkap sekaligus mengadili beberapa nama yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut<sup>14</sup>. Tim investigasi juga berhasil menyeret Amrozi, Imam Samudra dan Ali Gufron berhadapan dengan eksekusi hukuman mati.

---

<sup>11</sup> Bambang Abimanyu, *Teror Bom Azhari-Noor Din*( Jakarta: Republika, 2006), h. 83-90

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 61

<sup>13</sup> Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah, Pengakuan Mantan Anggota JI* (Jakarta: 2006), h. 11

<sup>14</sup> *Ibid*. h. 2

Jika bangsa tarik dalam kancan global, peristiwa bom Bali I mempunyai korelasi terhadap tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat yakni atas nama Islam. Di mana empat pesawat Boeing milik Amerika dibajak dan menabrak dua menara kembar WTC (*World Trade Center*) yang mengakibatkan lebih dari 3.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka.<sup>15</sup>

Dalam catatan sejarah, peristiwa tersebut menjadi titik awal dimulainya perang terbuka antara Barat (Amerika Serikat dan sekutu) dengan Gerakan Islam Radikal yang dianggap teroris. Pasca serangan tersebut, di bawah komando George Walker Bush, Amerika mengadakan ekspansi besar-besaran ke negara-negara Timur Tengah.<sup>16</sup> Salah satunya adalah Irak (2003) yang disinyalir menjadi tempat persembunyian *Al-Qaeda*, kelompok teroris yang bertanggung jawab terhadap penyerangan WTC.<sup>17</sup>

Selain memerangi terorisme, alasan G.W. Bush menjadikan Irak sebagai target operasi adalah tuduhan bahwa Irak memproduksi senjata pemusnah massal (nuklir). Bahkan alasan yang tidak ada keterkaitannya dengan terorisme menjadi legitimasi serangan Amerika ke Irak, yakni keinginan membebaskan masyarakat Irak dari belenggu kediktatoran Saddam Hussein.<sup>18</sup>

Namun, apapun alasan Amerika dan sekutu memerangi Irak, badai kritik terus bermunculan dari berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Ada tiga alasan yang setidaknya muncul ke permukaan, *Pertama*,

---

<sup>15</sup> Munawir Aziz, "*Relasi Islam-Terrorisme*; Subjek dan Objek", dalam Abdul Wachid (ed.), *Islam dan Terorisme* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2010), h. 122

<sup>16</sup> J.L.Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, Edisi Revisi (Bandung : Mizan, 2002), h.14.

<sup>17</sup> Samuel P. Huntington dalam tesisnya, *Clash of Civilization, Remaking of the World Order* (New York:Simon and Schuster, 2002 ) h. 127

<sup>18</sup> Saiful Munjani, Jajat Burhanudin, dkk, *Benturan Peradaban, Sikap dan Perilaku Islam Indonesia terhadap Amerika Serikat* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 2005), h. 3

perang yang dilakukan AS terhadap Irak tidak mendapat restu PBB. *Kedua*, sejak dimulainya perang hingga perang berakhir, tidak ada bukti bahwa Irak memproduksi senjata pemusnah massal. *Ketiga*, perang tersebut telah menelan korban lebih dari 85 ribu jiwa, dan sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, khususnya anak-anak dan perempuan.<sup>19</sup> Perang tersebut juga berdampak serius pada konstitusi Irak, karena berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein yang kemudian di hukum di tiang gantungan.

Pada 15 April 2011 bertepatan dengan shalat jum'at, sebuah bom bunuh diri meledak di masjid Polresta (Kepolisian Resort Kota) Cirebon. Kapolresta AKBP Herukoco beserta sejumlah anggota Polri yang sedang shalat berjama'ah terluka, begitu juga sejumlah jamaah sipil, termasuk imam/khatib. Sedangkan korban tewas hanyalah pelakunya sendiri yang kemudian diketahui bernama Muhammad Syarif.<sup>20</sup>

Dalam perjalanan Bangsa Indonesia, kekerasan mengatasnamakan agama sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, beberapa saat setelah Indonesia merdeka, para *founding father* bangsa berselisih paham saat hendak menentukan ideologi bangsa. Satu sisi, kaum Islam fundamentalis yang menghendaki dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta dalam pancasila, dan kelompok nasionalis yang menolaknya di lain sisi.

Menangnya kelompok nasionalis dengan dihapuskannya tujuh kata piagam Jakarta dalam Pancasila memunculkan kekecewaan bagi kelompok fundamentalis. Dan berangkat dari kekecewaan dan beberapa persoalan yang muncul saat itulah Kartosoewiryo,<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>[http://koran.republika.co.id/berita/82551/85\\_Ribu\\_Warga\\_Irak\\_Tewas\\_Akibat\\_Perang](http://koran.republika.co.id/berita/82551/85_Ribu_Warga_Irak_Tewas_Akibat_Perang)

Perang, diunduh pada tanggal 4 Maret 2016

<sup>20</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam tinjauan Psikologi* (Jakarta 2012) h.72

<sup>21</sup> Adhe Firmansyah, SM. *Kartosoewirjo, Biografi Singkat 1907-1962* (Jogjakarta: Garasi, 2009), h. 11

memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal, 7 Agustus 1949. Munculnya NII ini tidak bisa dipisahkan dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pasukan berbasis muslim Indonesia yang diciptakan untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial. Pasca dideklarasikan NII inilah perang saudara antara TNI dan DI/TII tak bisa dielakkan di negeri ini.

Pada titik tertentu, penulis ingin mengangkat satu teori yang diutarakan oleh Thomas More (1478-1535), bahwa memberantas kejahatan dengan tindakan kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti.<sup>22</sup> Begitu juga dalam konteks pemberantasan terorisme, strategi perang (*represif*) kurangnya tepat karena yang terjadi justru perlawanan. Bukan tanpa fakta, selama ini pemerintah lebih menekankan tindakan *represif* dalam menghadapi teroris, bahkan cenderung mengabaikan nilai-nilai asasi dari manusia (HAM). Walhasil, gerakan mereka semakin masif dan terbuka. Bahkan, mereka kian beringas dengan berani mengadakan penyerangan kepada aparat hukum, seperti penyerangan yang terjadi di Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatra Utara dengan menewaskan tiga anggota polisi.

Jika dalam satu dekade ini, pemerintah berhasil menumpas seluruh teroris yang ada, maka tidak ada garansi dalam jangka 10 atau 15 tahun yang akan datang Indonesia bisa benar-benar bersih dari terorisme. Alasannya cukup sederhana, di saat keturunan para teroris yang terbunuh sudah tumbuh dewasa, ketika spirit jihad terwariskan dalam diri mereka, kejahatan terorisme dipastikan akan lebih kejam. Bukan hanya jihad yang mendasari aksi mereka, melainkan juga motivasi balas dendam.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparat penegak hukum yang

---

<sup>22</sup> Dikutip oleh Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum* (Surabaya: PT. Dieta Persada. 2005). h.13



profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya diperlukan norma hukum yang progresif. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>23</sup> Oleh karena itu keberadaan perundang-undangan yang progresif, mempunyai kedudukan yang sentral dan strategis di dalam suatu Negara hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang adalah regulasi yang mengatur tentang mekanisme penindakan terhadap tindak pidana terorisme serta sistem kerja penunjang dengan keterkaitan yang sama. Undang-undang ini merupakan produk politik sehingga karakteristik isi akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.

Akhirnya, menanggapi Resolusi DKPBB Nomor 1438, pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Republik Indonesia, yaitu :

- a. Perpu Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut.
- b. Perpu Nomor 2 Tahun 2002, tentang pemberlakuan Perppu Nomor 1 tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali : Jakarta, 2000), h.5

peristiwa peledakan bom di Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut.

Kedua Perpu ini mulai berlaku tanggal 18 oktober 2002, dan selanjutnya tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>24</sup> Pertimbangan yang termuat dalam konsideran kedua peraturan tersebut adalah bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk praturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan denga terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, pada peristiwa peledakan Bom Bali, tanggal 12 Oktober 2002, dari awal kehadirannya memang merupakan peraturan perundang-undangan yang cukup kontroversial dan mengundang suara prokontra dari berbagai kalangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sejak awal kelahirannya merupakan peraturan perundang-undangan yang cukup kontroversial dan mengundang suara prokontra dari berbagai kalangan masyarakat. Suara pro tentunya berasal dari pejabat pemerintahan serta kalangan dan tokoh intelektual yang terlibat langsung dalam perancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Sedangkan suara kontra umumnya muncul dari kalangan akademisi dan tokoh-tokoh LSM serta pejuang demokrasi yang menghawatirkan kehadiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan menjadi ancaman terhadap proses transisi di Indonesia serta menilai kepentingan politik dan ideologi Negara asing terutama Amerika Serikat.

---

<sup>24</sup> *Ibid*,h.152

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan fokus masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis politik hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme?
2. Apakah kendala dan solusi dalam proses penegakan hukum terkait tentang pemberantasan tindak pidana terorisme?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
  - b. Untuk mengetahui apasaja kendala dan solusi dalam proses penegakan hukum terkait tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Manfaat Penelitian
 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan berguna untuk perkembangan keilmuan sekaligus mengisi kekosongan penelitian yang menelaah analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada para pelaku tindak kejahatan terorisme.
  - b. Secara praktis empirik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan serta evaluasi bagi masyarakat umum atau pemerintah terkait program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap pelaku kejahatan terorisme.

## **F. Metode Penelitian**

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam skripsi ini menggunakan sistem penelitian kualitatif (studi pustaka), yakni suatu penelitian dengan objek utamanya adalah analisis Politik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

### **2. Sifat Penelitian**

Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan, menguraikan secara objektif yang diteliti dalam hal ini mengenai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

### **3. Metode Penelitian**

Bahwa metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang (sementara berlangsung), tujuan utama kita dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

### **4. Sumber Data**

Karena penelitian ini merupakan *Library Research* study kepustakaan, maka Informasi dan data tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, diperoleh dari dua sumber, yaitu;

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data utama dan terpokok yang peneliti dapatkan dari objek penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, buku-buku yang menulis tentang terorisme tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, seperti laporan-laporan, buku-buku, serta jurnal penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, catalog perpustakaan, ensiklopedia dan daftar bacaan.

5. Analisis Data

Dalam mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, literature, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan bisa menjadi sumber informasi tentang masalah yang akan diteliti.<sup>25</sup>

Studi pustaka merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Peneliti tergolong peneliti literature (Studi pustaka) maka analisis data dilakukan kualitatif dan digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur.

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016) cet.ke17 h.6

## **BAB II**

### **POLITIK HUKUM DAN TERORISME**

#### **A. Pengertian dan Sejarah Politik Hukum Islam**

Politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *Politicos*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata *polis* artinya Kota. Politik juga diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat. Sedangkan secara terminologi Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.<sup>26</sup>

Politik dalam bahasa Arab disebut *siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Fiqh yang membahas masalah itu disebut Fiqh *Siyasah*. Secara terminologis, politik sebagai menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya.<sup>27</sup>

Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, *ad Diin wad Daulah*. Hal itu sangat berbeda dengan agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, Budha, Hindu. Karena agama-agama tersebut hanya memuat tuntunan-tuntunan moral saja, tetapi tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial.

---

<sup>26</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 462

<sup>27</sup> *Ibid* h.35;

Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan pemerkosaan dan penodaan terhadap agama. Karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Tetapi sangat berbeda dengan Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi dan lain-lain.

Politik Islam secara umum terbagi menjadi tiga macam<sup>28</sup> sebagai berikut :

1. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang Politik Tata Negara dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

---

<sup>28</sup> Esposito, J.L., *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas* (Edisi Revisi, Bandung : Mizan, 1996) h.162

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".<sup>29</sup>

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa' ar-Rasidin tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau "ahl al-halli wa al-aqdi".

---

<sup>29</sup> Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam* (Johor: Universiti Teknologi Malaysia 2003), h. 15



Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:

- a. Sulthah Tanfizhiyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang).
- b. Sulthah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat Undang-Undang).
- c. Sulthah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman).
- d. Sulthah Maliyah (kekuasaan keuangan).
- e. Sulthah Muraqabah wa Taqvim (kekuasaan pengawasan masyarakat).<sup>30</sup>

## 2. *Siyasah Dauliyah*

*Siyasah Dauliyah* merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Pada awalnya Islam hanya memperkenalkan satu sistem kekuasaan politik negara yaitu kekuasaan di bawah risalah Nabi Muhammad Saw dan berkembang menjadi satu sistem khilafah atau kekhilafaan. Dalam sistem ini dunia internasional, dipisahkan dalam tiga kelompok kenegaraan, yaitu, pertama, Negara Islam atau darussalam, yaitu Negara yang ditegakkan atas dasar berlakunya syariat Islam dalam kehidupan. Kedua, darus-harbi, yaitu negara non Islam yang kehadirannya mengancam kekuasaan Negara-Negara Islam serta menganggap musuh terhadap warga Negeranya yang menganut agama Islam. Ketiga, darus-sulh, yaitu Negara non-Islam yang menjalin persahabatan dengan Negara-Negara Islam, yang eksistensinya melindungi warga Negara yang menganut agama Islam.

Antara *darus-salam* dengan *darus-sulh* terdapat persepsi yang sama tentang batas kedualatannya, untuk saling menghormati dan bahkan menjalin kerja sama dengan dunia Internasional. Keduanya saling terikat

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 111

oleh konvensi untuk tidak saling menyerang dan hidup bertetangga secara damai, sementara hubungan antara *darus-salam* dengan *darus-harb* selalu diwarnai oleh sejarah hitam. Masing-masing selalu memperhitungkan terjadi konflik, namun demikian Islam telah meletakkan dasar untuk tidak berada dalam posisi pemrakarsa meletusnya perang. Perang dalam hal ini merupakan letak mempertahankan diri atau sebagai tindakan balasan. Perang dalam rangka menghadapi serangan musuh di dalam Islam memperoleh pengakuan yang syah secara hukum, dan termasuk dalam kategori jihad.

Meskipun jihad dalam bentuk perang dibenarkan di dalam Islam, namun pembenaran tersebut sebatas di dalam mempertahankan diri atau tindakan balasan. Juga terbatas di dalam rangka menaklukkan lawan bukan untuk membinasakan dalam arti pembantaian atau pemusnahan. Oleh karena itu, mereka yang menyerah, tertawan, para wanita, orang tua dan anak-anak, orang-orang cacat, tempat-tempat ibadah, dan sarana serta prasarana ekonomi rakyat secara umum harus dilindungi.<sup>31</sup>

Kekuasaan politik berikutnya mengalami perubahan tidak hanya mengakui satu sistem khilafah tetapi telah mengakui keragaman tentang khilafah. Selain itu juga memberi pengakuan atas otonomi negara-negara bagian kerajaan maupun kesultanan di Spanyol hingga Asia Tenggara. Pada konteks sekarang teori politik Islam kontemporer hanya memperkenalkan konsepsi hukum internasional dalam dua bagian besar; pertama, *al-Ahkam ad-Dauliyah al-Ammah*; yaitu suatu hukum internasional yang menangani masalah-masalah makro. Kedua, *al-Ahkam ad-Dauliyah al-Khosoh*, yaitu suatu hukum internasional yang menangani masalah-masalah mikro.

---

<sup>31</sup> Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum* (Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005), h. 173-174

Menurut Ali Anwar sebagaimana dikutip Hendrojono terdapat sembilan prinsip-prinsip politik luar Negeri dalam siyasah dauliyah.<sup>32</sup>

- a. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat (perjanjian), yang dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal Ayat : 58

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ

سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalilah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S Al-Anfal Ayat : 58).<sup>33</sup>

- b. Kehormatan dan integrasi Nasional

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا

تَتَّخِذُونَ أَيَّمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ

هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya : Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan

<sup>32</sup> Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum* (Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005), h. 174-175

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Semarang: CV.Toha putra, 1989), 488

kuat, menjadi cerai beraik kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (QS. An-Nahl: 92).<sup>34</sup>

c. Keadilan universal Internasional

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ  
بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا  
تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ  
اِنَّ اِلَهَ اللّٰهِ خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha

<sup>34</sup> Ibid,h.568

mengetahui apa yang kamu kerjakan.  
(QS. Al-Maidah: 8).<sup>35</sup>

- d. Menjaga perdamaian abadi.
- e. Menjaga ketentraman Negara-Negara lain

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ  
جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا  
قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ  
فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ  
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan

<sup>35</sup> Ibid,h.325

membunuh) mereka. (QS. An-Nisa: 89-90).<sup>36</sup>

- e. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di Negara lain.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا  
أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ  
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ  
يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ  
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka

<sup>36</sup> Ibid,h.214

meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Anfal: 72).<sup>37</sup>

- f. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ  
وَلَمْ تَخْرُجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا  
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8).<sup>38</sup>

- g. Kehormatan dalam hubungan internasional

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

Artinya : Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS.Ar-Rahman: 60).<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ibid, h.492

<sup>38</sup> Ibid, h.789

<sup>39</sup> Ibid, h.648

h. Persamaan keadilan untuk para penyerang

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

 صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya : dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu[846]. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.(QS. An-Nahl: 126).<sup>40</sup>

3. *Siyasah Maaliyah*

*Siyasah Maaliyah* adalah Politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. A.Mudhofir menyatakan bahwa politik ekonomi Islam adalah sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pelengkap (kebutuhan sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan (jika memungkinkan) terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang (perindividu) yang hidup di dalam Negara Islam, sesuai dengan syaria Islam.<sup>41</sup>

Dengan demikian, politik ekonomi Islam didasarkan pada empat pandangan dasar yaitu:

- a. Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhannya.
- b. Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam Daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya.

<sup>40</sup> *Ibid*,h.564

<sup>41</sup> Abdullah, Mudhofir, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Jakarta: Inti Media, 2009) h. 59



- c. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar mereka bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, alias bisa memasuki mekanisme pasar.
- d. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi termasuk interaksi ekonomi.

Atas dasar itu, politik ekonomi Islam tidak sekadar diarahkan untuk meningkatnya pendapat nasional (GNP) atau disandarkan pada pertumbuhan ekonomi nasional, keadilan sosial, dan lain sebagainya.

Politik ekonomi Islam terutama ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh bagi setiap orang yang hidup di Negara Islam. Atas dasar itu, persoalan ekonomi bukanlah bagaimana meningkatkan kuantitas produksi barang dan jasa, tetapi sampainya barang dan jasa itu kepada setiap orang (distribusi). Hanya saja, pertumbuhan ekonomi juga menjadi obyek yang diperhatikan dan hendak diselesaikan di dalam sistem ekonomi Islam. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa obyek persoalan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam ada macam:

- a. Politik ekonomi;
- b. Pertumbuhan kekayaan.

Menurut an-Nahbani dan al-Maliki, politik ekonomi Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyah/basic needs) bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan luks (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan kekhasan di dalamnya. Dengan demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam

terletak pada permasalahan individu manusia bukan pada tingkat kolektif (negara dan masyarakat).<sup>42</sup>

Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam. Pertama, setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. Kedua, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh (lengkap). Ketiga, mubah (boleh) hukumnya bagi individu mencari rezki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Keempat, nilai-nilai luhur (syariat Islam) harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik ekonomi kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara (Muslim dan non Muslim/kafir dzimmi) dan mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

## **B. Prinsip dan Teori Politik Hukum Islam**

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya.<sup>43</sup> Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok. Adapun secara terminologi Prinsip adalah kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip

---

<sup>42</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h.53

<sup>43</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Bulan Bintang, Jakarta, 1958), h. 209

hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat unuversal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.<sup>44</sup>

#### 1. *Sistem musyawarah (As-Syurah)*

*Sistem musyawarah (As-Syurah)* yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ  
لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ  
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."<sup>45</sup>

Syura adalah sistem Arab original dan merupakan satu tradisi suku-suku Arab tribal yang sudah membumi dan turun-temurun hingga sekarang.

<sup>44</sup> Suryadi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia* (Usaha Nasional, Surabaya, 1980), h. 190

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 258

Ia muncul dan tumbuh, bukan untuk menguasai kepala atau kepala suku, melainkan lebih merupakan mekanisme penjaringan ide-ide terbaik dan terbagus yang berlangsung di lembaga Majelis Permusyawaratan Suku. Sedangkan kata *syura* dalam bahasa Arab berarti menjangkau ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas.

Musyawarah dapat juga diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan, ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional, dalam politik Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam politik Islam musyawarah berfungsi sebagai rem atau pencegah kekuasaan absolut dari seorang penguasa atau kepala Negara.<sup>46</sup>

Meskipun demikian, musyawarah berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus "setengah plus satu" atau suara mayoritas yang lebih dari separo berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak yang lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan

---

<sup>46</sup> Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012).h.112

musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Karena itu, yang perlu diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang akan diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Inilah yang dijadikan suatu kriterium dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah menurut politik Islam. Selain itu, dalam setiap musyawarah yang perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara. Jadi dalam musyawarah buah pikiran seseorang adalah lebih penting dari orangnya sendiri. Mungkin saja buah pikiran itu lahir dari seorang yang bukan hartawan atau bangsawan, namun gagasannya itu sangat berguna bagi kepentingan umum ketimbang misalnya, buah pikiran dari seorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat, namun tidak berguna bagi kepentingan umum, maka buah pikiran yang pertama itulah yang patut diperhatikan dalam musyawarah.

Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Pada masa Rasulullah Saw sebagai kepala negara, beliau selalu mengumpulkan para sahabat di Masjid Madinah untuk bermusyawarah setiap kali beliau menghadapi masalah kenegaraan. Tradisi ini dilanjutkan oleh keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah Saw, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib.<sup>47</sup>

## 2. *Al-Adl (Keadilan).*

Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua dalam politik Islam. Keadilan dalam Islam tidak ada

---

<sup>47</sup> Chalil, Moenawar, "*Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilid I* (" Jakarta: Gema Insani, 2001), h.98

persamaannya dengan keadilan dalam sistem mana pun. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. Keadilan menurut Al-Qur'an sendiri meliputi lima hal.

- a. Keadilan Allah Swt bersifat mutlak sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Ali Imran ayat 18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا  
الْعِلْمِ قَابِئًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

Artinya: "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>48</sup>

- b. Keadilan firman-Nya atas ayat-ayat-Nya tertuang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana terlihat dalam Surah Al-Maidah ayat 25.

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا

وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Berkata Musa: "Ya Tuhanku, Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. sebab itu pisahkanlah

<sup>48</sup> Ibid,h.564

antara kami dengan orang-orang yang fasik itu”.<sup>49</sup>

- c. Keadilan syariat-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-An’am ayat 161.

قُلْ إِنِّي هَدَيْتُنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا  
قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ



Artinya: ”Katakanlah: “Sesungguhnya Aku Telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik”.<sup>50</sup>

- d. Keadilan pada alam ciptaan-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Tin ayat 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: ”Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”.<sup>51</sup>

- e. Keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam Al-Qur’an diserukan agar supaya orang-orang yang beriman dapat menegakkan keadilan semata-

<sup>49</sup> *Ibid*,h.245

<sup>50</sup> *Ibid*,h.587

<sup>51</sup> *Ibid*,h.785

mata karena Allah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri dengan tegas diperintahkan agar berlaku adil terhadap orang-orang yang Non Islam sekalipun. Seperti dalam firman Allah Swt dalam Surah Asy-Syura ayat 15.

فَلِذَلِكَ فَادْعُ<sup>ط</sup> وَاسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتَ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعْ<sup>ط</sup>  
 أَهْوَاءَهُمْ<sup>ط</sup> وَقُلْ<sup>ط</sup> ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ<sup>ط</sup>  
 كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ<sup>ط</sup> بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ<sup>ط</sup>  
 لَنَا أَعْمَلْنَا<sup>ط</sup> وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ<sup>ط</sup> لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا<sup>ط</sup>  
 وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ<sup>ط</sup>

Artinya: "Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. bagi kami amAl-amal kami dan bagi kamu amAl-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Ibid, h. 985



3. *Al-Hurriyah (Kemerdekaan/kebebasan yang bertanggungjawab)*

Kebebasan yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah kebebasan hati nurani. Kebebasan dan kebahagiaan hati nurani tidak dapat dicapai dengan membebaskan hati dari kenikmatan hidup di dunia, mengabaikan kehidupan dunia, dan hanya selalu menghadap ke arah Tuhan di langit. Seseorang tidak lebih utama dari pada lainnya, kecuali dengan amal dan taqwanya. Islam menekankan hal ini dengan sungguh-sungguh, karena para nabi merupakan orang-orang yang mungkin menjadi sasaran penyembahan dan perhormatan yang melebihi batas, maka Islam membebaskan hati nurani ini dengan pembebasan yang semperuna. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Ali Imran ayat 144.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ<sup>ج</sup>

أَفَاِئِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ اٰنْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اٰعْقِبِكُمْ<sup>ج</sup> وَمَنْ

يَنْقَلِبْ عَلٰٓى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اِلٰهَ شَيْئًا<sup>هـ</sup> وَسَيَجْزٰى

اِلٰهَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad) barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan

Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.<sup>53</sup>

#### 4. *Al-Musaawah (Persamaan)*.

Prinsip persamaan dalam politik Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elite. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka dari kelompok elite. Nabi berkata: ”Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya”

Prinsip persamaan dalam Islam juga sebenarnya berdasarkan kemanusiaan yang menghapus pandangan rasialisme. Pandangan ini berlaku antara laki-laki dan perempuan. Islam telah mengatur bagaimana terwujudnya hubungan harmonis antara suami dan istri. Begitu juga laki-laki dan perempuan menduduki tempat yang sama dilihat dari segi jenisnya. Perbedaan keduanya hanya terletak di dalam kesiapan masing-masing. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa ayat 124.

---

<sup>53</sup> *Ibid*,h.325

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ  
نَقِيرًا

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun."<sup>54</sup>

Bahkan pada masa Nabi Muhammad Saw banyak perempuan berkiprah dan beraktivitas tanpa batas di sektor publik, seperti Khadijah bint Khuwailid (istri Nabi) dan Qailah Umm Bani Ahmar. Keduanya dikenal sebagai perempuan pengusaha yang sukses. Umm Salim bint Malhan bekerja sebagai penata rias. Zainab bint Jahsyi (istri Nabi) bekerja sebagai penyamak kulit dan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Asy-Syifa` adalah perempuan pertama disertai tugas oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab sebagai manajer yang mengelola pasar Madinah. Bahkan, ada seorang perempuan bernama Raitah (istri sahabat Nabi) bekerja demi menghidupi suami dan anaknya. Perempuan-perempuan lainnya seperti Umm Salamah (istri Nabi), Safiyyah, Laila Al-Gaffariyah, dan Umm Sinam tercatat sebagai aktivis dan relawan kemanusiaan di medan perang menolong prajurit yang cedera dalam peperangan.

<sup>54</sup> *Ibid*,h.369

Sistem politik Islam memang sebagian besarnya merupakan ijtihad, Al-Qur'an tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisma dan pelaksanaan di lapangan. Tetapi cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik. Dan ini sudah cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakannya dengan sistem politik sekular atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratik dan sebagainya. Selain daripada prinsip dan garis panduan yang diberikan dalam Al-Qur'an dan Asunnah, Islam memberi kelonggaran untuk memikirkan sendiri kaedah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntutan zaman. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika Syari'ah dan rasionalitas Islam. Ia juga sesuai dengan objektif syari'ah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia.<sup>55</sup>

## **C. Kegunaan Kajian Politik Hukum Islam**

### **1. Karakteristik Politik Islam**

Corak sebuah masyarakat termasuk masyarakat Islam pada dasarnya ditentukan oleh interaksi warga dengan ideologi yang menjadi keyakinannya, serta pengalaman dalam menghadapi tantangan eksternalnya. Interaksi ideologi dan pengalaman dirinya yang mengkristal dalam sebuah masyarakat dapat melahirkan karakteristik yang khas, yang menjadi ciri sosial dan siyasah masyarakat tersebut. Sedangkan setiap ideologi melahirkan konsep-konsep dan tata sosial dan kultural beserta sub sistem-sub sistem, termasuk sub sistem siyasah yang membentuk perilaku siyasah dan sekaligus menjadi karakteristiknya yang unik.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*,h.58

<sup>56</sup> <http://romain/newcatvideo/internasional/2009/12/31/96974/Video->

Masyarakat Islam merupakan sebuah masyarakat yang unik baik dalam komposisi unsur pembentukannya ataupun dalam karakteristik spesifiknya. Ia adalah masyarakat Rabbani, manusiawi dan seimbang. Keanggotaannya mencakup ragam etnisitas dan komunal. Ia adalah masyarakat lintas lokal, lintas kultural, dan lintas etnis yang diikat oleh nilai-nilai dan akidah Islam, sehingga melahirkan tata sosial dan siyasah yang khas.

Siyasah Islam merupakan cerminan utuh dari karakter Islam seperti sifat syumuliyah (universal), Rabbaniyah (bersifat ketuhanan), Tsabak (Tetap), tawazun (seimbang), dan waqi'iyah (realistik). Adapun karakteristik siyasah Islam adalah sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. *Bersifat Rabbaniyah*, dalam arti sumber, teori, dan aplikasinya. Maksudnya seluruh aktivitas siyasah mengacu kepada hukum dan nilai-nilai yang berasal dari Allah Swt atau keteladanan Nabi Muhammad Saw. Maka semua konsepsi, metodologi, dan aplikasi siyasah Islam mengacu pada sumber-sumber rabbaniyah. Aktivitas siyasah apapun yang dilakukan kaum muslimin tidak pernah lepas dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah-Nya di bumi yang bertugas memakmurkannya dengan kehendak dan ketentuan-Nya.
- b. *Syari'ah*. Maksudnya menjunjung tinggi syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah Swt dalam seluruh aspeknya. Menurut Imam al-Mawardi syariah mempunyai posisi menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan. Ia memadukan antara realita kekuasaan dan idealita siyasah seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai ukuran justifikasi kepantasan atau kepatutan siyasah yang menyebabkan ia berhak menjalankan

kekuasaan. Dengan demikian, dalam siyasah Islam, sebuah penguasa atau pemerintahan yang tidak menerapkan syariah dipandang sebagai pemerintahan atau penguasa yang tidak syar'i (tidak legitimed). Setiap muslim wajib menolak pemerintah yang tidak syar'i dan tidak menerapkan hukum-hukum Allah Swt. Muslim yang dengan kejujurannya melakukan penolakan terhadap pemerintahan yang bathil digolongkan sebagai pejuang yang nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai jihad. Bahkan, pejuang yang meluruskan pemerintahan kaum muslimin yang bengkok dikategorikan sebagai jihad siyasi.

- c. *Seimbang baik dalam pandangan hidup ataupun perilaku.* Maksudnya bahwa seluruh sistem politik Islam berdiri di atas landasan keseimbangan yang telah menjadi ciri alamiah segala makhluk Allah Swt. Oleh karena itu, sikap, kebijakan, atau tindakan, lebih-lebih tindakan siyasah yang menjauh dari asas keseimbangan akan menimbulkan dampak dan implikasi yang sangat luas, yaitu terjadinya berbagai kerusakan di segala bidang kehidupan. Selanjutnya kerusakan-kerusakan itu akan semakin meluas dan melahirkan berbagai malapetaka yang kehancurannya bukan hanya melanda kehidupan manusia sebagai pelaku kerusakan tapi juga pada alam lingkungannya.
- d. *Adil* yaitu meletakkan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas. Maksudnya, bahwa politik Islam meletakkan adil sebagai pra syarat bagi legitimasi sebuah pemerintahan. Oleh karenanya, Islam memandang suatu kebijakan atau tindakan yang jelas-jelas mengabaikan keadilan dan menyepelekan kebenaran adalah salah satu bentuk kezaliman. Kezaliman dan ketidakadilan identik dengan kerusakan dan kegelapan. Keduanya menjadi sumber kehancuran bagi kemanusiaan.

- e. *Moderat (wasathiyah)*. Maksudnya, bahwa politik Islam harus berdiri dengan kebenaran tengah dua kebatilan, keadilan di tengah dua kezaliman, di tengah-tengah di antara dua ekstemitas yang menolak eksageritas. Misalnya, masalah-masalah yang menyangkut sistem moral yang memadu perilaku siyasah seorang muslim. Ia berada di tengah antara sistem moral yang sangat idealistik yang nyaris tidak dapat diterapkan oleh manusia dengan sistem moral yang sangat pragmatik yang cenderung tidak mengindahkan norma-norma.
- f. *Alamiah dan manusiawi*. Maksudnya siyasah Islam tidak mengeksploitasi alam secara membabi buta. Bahkan aktivitas siyasah yang dapat merusak tata alamiah yang disebabkan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah Swt dipandang sebagai telah melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula Islam memandang pengahrgaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing sebagai kebajikan yang sangat manusiawi. Untuk itu, Islam menekankan para pemegang kekuasaan supaya terus menjunjung tinggi HAM yang paling fundamental seperti hak hidup dan kehormatannya selain memperhatikan masalah kebutuhan primer manusia yang dengannya ia dapat menjaga harkat dan martabatnya.
- g. *Egaliter*, maksudnya siyasah Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun keyakinannya.
- h. *Memerdekakan*. Watak siyasah Islam yang alamiah, manusiawi, egaliter berkonsekuensi pada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Kemanusiaan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang paling fundamental. Secara luas kaum muslimin menyakini tiga nikmat dari Allah

Swt yang dipandang paling fundamental, yaitu nikmat Iman, nikmat hidup, dan kemerdekaan. Dalam Islam ketiga nikmat itu dikategorikan sebagai bagian dari HAM yang asasi dan karenanya harus dihormati secara proporsional. Maka Islam menekankan enam prinsip yang harus menjadi landasan aktivitas siyasah yang bertujuan menciptakan suatu situasi dan iklim kemerdekaan, yaitu:

- 1) kebebasan dalam Islam tidak boleh lepas dari prinsip keadilan,
  - 2) kebebasan yang ditekankan Islam adalah kebebasan yang disertai sifat akhlak terpuji, seperti kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya,
  - 3) kebebasan yang diberikan Islam kepada individu dan masyarakat adalah kebebasan yang disesuaikan dengan syariah dan selaras dengan tabiat manusia,
  - 4) kebebasan yang dikuatkan Islam adalah kebebasan yang menyelaraskan antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat,
  - 5) kebebasan individu menurut Islam akan berhenti di mana, bermula kebebasan orang lain,
  - 6) kebebasan hakiki tidak akan terwujud jika tidak dalam rangka agama, akhlak, tanggung jawab, akal dan keindahan.
- i. *Bermoral*. Maksudnya kebebasan yang ingin diwujudkan oleh siyasah Islam bertujuan untuk memastikan manusia sebagai makhluk bermoral yang dengan kemerdekaan dan kebebasannya ia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap semua pilihan yang.
  - j. *Orientasi pelayanan*. Maksudnya secara fundamental aktivitas siyasah Islam bertanggung jawab dalam memperhatikan dan melayani semua yang berada dalam kekuasaannya, terutama mereka yang lemah secara ekonomi dan sosial. Selanjutnya



pemerintah berkewajiban memberikan jaminan yang layak kepada semua penduduk agar memperoleh semua hak-haknya dan terbebas dari kesewangwenangan orang kuat yang memangsa mereka.

- k. *Orientasi ukhrawi*. Maksudnya dengan siyasah Islam diharapkan akan terciptanya kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Karena aktivitas siyasah yang hanya diarahkan untuk memperoleh kesenangan atau kesejahteraan duniawi justru berjuang pada kesengsaraan dan penderitaan, bahkan dalam banyak kasus, kehancuran.<sup>58</sup>

## 2. Kegunaan Politik Islam

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup politik Islam (fikih Siyasah) atas beberapa bagian, menjelaskan bahwa ruang lingkup fikih siyasah mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), politik moneter (*siyasah maliyyah*), politik peradilan (*siyasah qada'iyah*), politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), dan politik administrasi (*siyasah idariyyah*).<sup>59</sup> Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'iwa ar-Ra'iyah* (Politik hukum untuk kemaslahatan penguasa dan rakyat) membagi fikih siyasah atas tiga bagian, yakni politik administrasi (*siyasah idariyyah*), politik moneter (*siyasah maliyyah*), dan politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*).<sup>60</sup> Sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy, ahli Hukum Islam Indonesia membaginya atas delapan bagian, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Ishak, Mohd. Said, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Johor: Universiti Teknologi Malaysia: 2003) h.158-161

<sup>59</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tatanegara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* diterjemahkan oleh Abdul Hayye Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet ke-1 (Jakarta:Gema Insani Press,2000), h. 189

<sup>60</sup> Ibnu Taimiyyah, "*As-Siyah Asyar'iyah*" ('Cairo,1951), h.172

<sup>61</sup> Ash-Sidiqie, Hasbie, *Tafsir al-Bayan* (Bandung : PT. Al-Ma'arif,

Berdasarkan pembagian di atas, secara umum ruang lingkup fikih siyasah terdiri empat bagian, pertama, politik perundang-undangan mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang/hukum. Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar negara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, politik luar negeri dalam bentuk hubungan antar negara Islam dan non Islam, tata cara pergaulan warga negara muslim dengan non muslim di negara Islam, dan hubungan antara negara Islam dengan negara lain dalam keadaan perang dan damai. Ketiga, politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan perbankan. Keempat, politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan dan harta rampasan perang serta usaha menuju.<sup>62</sup>

#### **D. Pengertian Terorisme dan Dalil Larangannya.**

Terorisme berasal dari kata dasar teror yang mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk mencapai suatu kondisi ketakutan di dalam kelompok masyarakat lebih luas. Menurut Kamus Ilmiah, “Terorisme adalah hal undakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik).”<sup>63</sup>

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut terhadap sekelompok masyarakat atau negara. Terorisme menurut Abdullah Mahmud Hendropriyono adalah cara atau teknik

---

1966) .h.156

<sup>62</sup> Makaarim, Mufti, dan Wendy Andika Prajuli (eds), *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia* (Jakarta: Institut for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), 2009), h. 365-366

<sup>63</sup> Riwayadi Susilo, T.t, *Kamus Lengkap* (Surabaya, Penerbit Sinar Terang, 2011),h.471

intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.

Menurut Persatuan Bangsa-bangsa (PBB): “Terorisme adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa manusia yang tidak berdosa, atau menghancurkan kebebasan azasi, atau melanggar kehormatan manusia.”<sup>64</sup>

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”<sup>65</sup>

Disamping hal diatas Muladi menjelaskan definisi terorisme, bahwa hakikat perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku merupakan individu, kelompok, atau suatu negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM), dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia yang ditulis oleh tim penyusun. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik. Disamping itu dalam kamus besar bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa, terorisme berasal dari kata dasar teror yang artinya usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan, memaksakan idiologi, penafsiran keyakinan atau eksploitasi agama, kebudayaan, dan pemaksaan konsep filsafat.<sup>66</sup>

Terorisme muncul karena perbedaan pendapat dan pandangan mengenai ajaran dan kepercayaan, namun

---

<sup>64</sup> Dzulqarnain Muhammad Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme* (Makasar : Pustaka Assunah, 2011), h.125

<sup>65</sup> UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 472

dewasa ini tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang memandang kekerasan merupakan cara yang baik untuk mewujudkan dari kepercayaan mereka. Istilah jihad dalam teroris adalah suatu cara untuk membela agamanya dari segala bentuk diskriminasi agama baik dari dalam maupun dari luar pemeluk agama islam sendiri.

Jaringan Islam Al-Qaeda adalah pemeluk agama Islam yang mengutuk negara-negara yang menindas kaum Islam, dan menganggap non-Muslim sebagai jailiyah modern. Jelas pandangan ini apa bila berkembang terus di Indonesia akan menjadi penghambat dari toleransi umat beragama dan pluralisme masyarakat Indonesia yang berbeda keyakinan. Pandangan seperti itu jelas sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad

Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam isu terorisme terutama terkait dengan politik, telah melahirkan berbagai opini yang berpengaruh terhadap definisi terorisme, salah satunya opini Peter Rösler-Garcia, seorang ahli politik dan ekonomi luar Negeri dari Hamburg, Jerman yang menyatakan tidak ada suatu negara di dunia ini yang secara konsekuen melawan terorisme.<sup>67</sup>

Sebagai contoh, Amerika Serikat sebagai negara yang paling gencar mempropagandakan isu "Perang Global Melawan Terorisme", membiayai kelompok teroris "IRA" di Irlandia Utara atau gerakan bersenjata "Unita" di Angola. Selanjutnya, politikus Uni Eropa mendukung bermacam kelompok teroris di Afrika, Asia, Amerika Latin-termasuk gerakan teroris di Uni Eropa sendiri, sebagai "ETA" dari Spanyol. Ada juga pemerintah negara atau pemerintahan kotapraja Uni Eropa yang secara resmi melindungi perwakilan kelompok ekstremis itu di wilayah mereka, dan yang lain menerima kegiatan kelompok itu secara diam.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Peter Rösler-Garcia, "Terorisme, Anak Kandung Ekstremisme", <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/15/opini/tero30.htm>>, diakses 20 November 2016

<sup>68</sup> Adjie Suradji, *Terorisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 249.

Banyaknya kepentingan berlatar belakang politik, menyebabkan pemahaman mengenai pengertian terorisme juga terbias akibat perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang ini terlihat dalam kasus invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Amerika Serikat melegitimasi tindakannya menginvasi Irak karena menganggap Irak sebagai teroris sebab Irak memiliki senjata pemusnah masal, namun disisi lain, banyak negara yang menyatakan Amerika sendiri lah yang merupakan negara teroris (*state terrorist*), karena telah melakukan invasi ke negara berdaulat tanpa persetujuan dari dewan keamanan PBB.<sup>69</sup>

Terlepas dari banyaknya pengaruh kepentingan politik dalam pendefinisian terorisme, ada hal lain yang mempengaruhi sulitnya memberikan definisi yang objektif. Kesulitannya terletak dalam menentukan secara kualitatif bagaimana suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai terorisme. Teror -yang merupakan kata dasar dari terorisme- bersifat sangat subjektif. Artinya, setiap orang memiliki batas ambang ketakutannya sendiri, dan secara subjektif menentukan apakah suatu peristiwa merupakan teror atau hanya peristiwa biasa.<sup>70</sup>

Dari berbagai macam aksi teror yang terjadi di Indonesia yang sering menuding atau dikaitkan dengan syari'at Islam dan juga menimbulkan kebingungan di kalangan muslimin. Ditambah lagi munculnya orang-orang jahil dan bodoh yang menjadikan dirinya sebagai ahli fatwa yang mengidentikkan Islam dengan terorisme.

Berbagai larangan dalam bentuk hukum perundang-undangan telah ditetapkan dalam memerangi tindak terorisme ini. Namun Undang-Undang tersebut sepertinya kurang efektif untuk memerangi kasus ini.

---

<sup>69</sup> Wahid, Abdul, Sunardi, Muhamad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005) h.22

<sup>70</sup> Paul Wilkinson, *Terrorism and the Liberal State* (London: The Macmillan Press Ltd., 1977), sebagaimana dikutip oleh F. Budi Hardiman dalam F. Budi Hardiman dkk., *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi* (Jakarta: Imparsial, 2005), h. 5.

Terorisme dalam pandangan hukum Islam merupakan hal yang melenceng dari agama Islam itu sendiri. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam didalam kehidupan manusia sebagai rahmat dan kenikmatan yang besar bagi manusia bukan suatu musibah yang membawa malapetaka.

Didukung oleh berdirinya gerakan-gerakan Islam khususnya di Indonesia sendiri yang bersifat radikal yang ingin mendirikan suatu Negara Islam dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam sehingga mereka biasanya bertindak kasar dan melakukan aksi teror dalam mencapai tujuannya tersebut. Para teroris tersebut melakukan aksi terornya mengatasnamakan Islam sebagai jihad. Namun pengertian jihad sendiri dalam Islam bukanlah memerangi umatnya sendiri yang justru menghancurkan dan merusak tetapi jihad dalam Islam adalah upaya mengerahkan segala jiwa raga atas nama Allah sesuai ketentuan-ketentuan yang diajarkan dalam syari'at Islam. Praktik jihad yang diajarkan nabi dalam peperangan bukan hanya untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan musuh. Tetapi untuk sesuatu yang mulia dan juga mendatangkan manfaat bagi manusia. Dalam Islam, peperangan hanya diizinkan dalam kondisi seperti: sebagai langkah bertahan (defensif) untuk melindungi kaum muslim.<sup>71</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya : “dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Al-Baqarah ayat 190)

---

<sup>71</sup> Fealy, Greg, Antony Bubalo. *Jejak kafilah: pengaruh radikalisme timur tengah di Indonesia*. 2005. Bandung : Mizan h.127

Kedua, diusir dari rumah dan tanah air.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ  
 أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۖ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۖ  
 كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya : *dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.* (Al-Baqarah : 191)

Ketiga, ketika umat Islam dianiaya karena menganut agama Islam.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ  
 لَقَدِيرٌ

Artinya : *“Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya”.* (Al-Hajj : 39)

Keempat, jika kaum musyrik mengingkari perjanjian (perang atau damai) yang telah mereka buat lalu mengejek agama Allah.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ  
فَقَاتِلُوا أَيمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ  
يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya : *Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (At-Taubah: 12)*

Persoalan utama dalam aksi terorisme dalam pandangan hukum Islam adalah pemaknaan kata jihad. Para aktifis muslim dituding sebagai penyebar ajaran teror memahami jihad sebagai bentuk perlawanan terhadap para penolak Islam. Mereka memahami jihad sebagai balas dendam karena kafir telah memerangi Islam secara tidak terbatas, maka wajib pula muslim memerangi kafir secara tidak terbatas.

Dalam memahami konsep jihad dalam hukum Islam dibagi menjadi empat tahapan. Pertama, kaum muslimin diperintahkan menahan diri untuk bersabar dan tidak melakukan pembalasan terhadap penindasan, kekejaman dan celaan kafir Quraisy. Kedua, tahapan sebatas diizinkan berperang tetapi belum diperintahkan berperang, sehingga belum ada kewajiban berperang. Ketiga, tahapan diwajibkan memerangi kaum kafir secara terbatas, hanya kaum kafir yang memerangi kaum muslimin sedangkan



kaum kafir yang tidak memerangi kaum muslimin tetap tidak diperangi. Keempat, tahapan yang mewajibkan kaum muslimin untuk memerangi seluruh kaum kafir dan musyrik.

Larangan melakukan tindakan kekerasan atas nama agama (jihad) atau terorisme telah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2003 dengan mengeluarkan fatwa yang mengharamkan atas tindakan tersebut. Ketua dewan fatwa MUI, Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan fatwa tersebut karena Indonesia bukan wilayah perang dan terorisme adalah perbuatan haram.<sup>72</sup>

Dalam hukum pidana Islam, terorisme dimasukkan kedalam golongan jarimah hirabah. Golongan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yaitu pengambilan hak orang secara terang-terangan disertai tindak kekerasan. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan kepada siapa saja dalam dar as-salam. Dalam kaidah lain disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak akan dikenai hukuman kecuali berdasarkan nash. Nash disini mengikat dan berlaku terhadap pelaku dan tempat melakukan perbuatan tersebut.

Imam malik asy-Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan atau terorisme yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut termasuk daerah dar as-salam baik pelakunya seorang muslim, zimmiy maupun musta'min.

Hukum Islam tentang terorisme diperlakukan tegas dan keras terinci dalam keputusan Majelis Hai'ah Kibar Ulama (Lembaga Ulama Besar) N0. 148 tanggal 12/1/1409 H (9/5/1998 M) dengan persetujuan dan tanda tangan anggota majelis.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> B.N. Marbun S.H., *kamus politik*. 2005. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, h.154

<sup>73</sup> Jamal, M.A, Fauzan. *Intelijen nabi: melacak jaringan intelijen militer dan sipil pada masa Rasulullah*. 2008. Jakarta: pustaka OASIS, h.197

Hal-hal yang diputuskan oleh majelis, diantaranya sebagai berikut:

1. Yang terbukti secara syar'i melukan perbuatan terorisme dan membuat kerusakan di muka bumi yang menyebabkan kerusakan dan keamanan, hukumannya adalah dibunuh berdasarkan kandungan yang tertera dalam ayat suci Al-Qur'an.
2. Sebelum dibunuh seperti poin yang diatas, pelaku harus menyelesaikan administrasi si pengadilan syari'at, Hai'ah At-Tamyiz dan Mahkamah Agung dalam rangka pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Allah SWT menjaga manusia, agama, badan, jiwa, kehormatan, akal, dan harta bendanya dengan disyari'atkan hudud (hukum-hukum ganjaran) dan uqubah (hukuman balasan) yang akan menciptakan keamanan yang umum dan khusus.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٨١﴾

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara bersilangan), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

*Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat siksaan yang besar". (QS. Al-Mâ'idah : 33).*

Tindakan preventif terhadap penyembuhan aksi terorisme awalnya disikapi dengan menghiasi jiwa kita akan pemikiran islam yang lurus, penguatan aqidah, selalu dalam naungan wahyu illahi dan mau memahami maknanya. Adapun solusi terorisme di negeri-negeri kafir, harus di imbangi dengan undang-undang negeri tersebut. Sangat disayangkan dalam mayoritas negeri islam mengikuti jejak negeri-negeri kafir dalam penegakkan hukum undang-undang dasarnya yaitu dalam menyelesaikan masalah suatu negeri misalnya. Biasanya mereka menyelesaikan dengan Undang-Undang yang mereka buat sendiri bukan dengan syari'at islam yang maha suci ini.

## **E. Bahaya-bahaya Terorisme dan Dampaknya**

Suatu aksi kekerasan jelas akan meninggalkan kesedihan, ratap tangis, dan kesengsaraan dari banyak pihak. Disinilah aksi terorisme dianggap sebagai suatu aksi kekerasan yang menyebabkan derita, luka, bahkan kematian dini. Seperti yang telah kita ketahui baik dari televisi maupun media masa lainnya, terorisme yang berkembang di Indonesia adalah jaringan Al Qaeda yang mengusung misi jihad. Pemahaman konsep jihad yang salah menebakkan orang melakukan aksi kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan banyak pihak termasuk diri sendiri.

Pemahaman konsep yang salah juga harus diimbangi dengan pengertian yang benar agar segala penafsiran arti pengorbanan tidak menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku. Jihad yang dijelaskan oleh Rosulullah adalah pembelaan pada agama dari orang-orang yang dianggap murtad. Konsep jihad inilah yang disalah artikan oleh sebagian umat Islam. Sehingga menyebabkan Islam diberi julukan agama teroris. Padahal tidak semua umat Islam

melakukan jihad yang salah. Jelas dari aksi terorisme yang mengatas namakan jihad, dalam agama Islam dibenarkan, karena itu sama saja membela agamanya.

Namun tidak halnya dimata hukum Indonesia. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, akan tetap dikatakan melanggar hukum. Hal ini terbukti dari penangkapan dan eksekusi mati para pelaku pengeboman. Dimata negara mereka bukan jihad yang diajarkan oleh agama. Melainkan menjalankan aksi terorisme yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara khususnya negara Indonesia.

Dalil atas nama agama, terkadang menyudutkan dan menyulitkan pemerintah dalam penegakan hukum untuk menghakimi para pelaku teroris. Karena akan terjadi suatu kondisi pro dan kontra atas aksi mereka. Tidak sedikit orang yang membenarkan aksi mereka dan tidak sedikit juga yang mengutuk perbuatan keji mereka. Jelas terlihat para misioner Islam dalam menyampaikan hakikat dari jihad belum bisa dipahami seutuhnya oleh umatnya. Sehingga menimbulkan pengertian yang salah.<sup>74</sup>

## **F. Faktor-faktor Terjadinya Terorisme.**

### **a. Kekurangsiapan Intelejen**

Terdapat kegagalan inteljen pemerintah Indonesia dalam mendeteksi potensi terjadinya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teroris. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus pengeboman ditempat-tempat yang dianggap keamanannya sangat ketat dan terjaga, misalnya di Hotel Marriott dan Ritz-Carlton sebuah bom dengan kekuatan dahsyat thermonuklir pada tanggal 17 Juli 2009 diledakkan. Ledakkan hampir bersamaan yaitu sekitar jam 07.50 WIB di dua tempat yang berbeda.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (PT Rafika Aditama, Bandung, 2000), hlm 58.

<sup>75</sup> Andalas, Mutiara. "Ekoteologi: Menebus Firdaus Dari Holocaust". *Majalah Basis* Nomor 03-04, Tahun ke-57, Maret-April 2000

Di tempat-tempat itu tentunya kita tahu, bahwa tanggung jawab teknis dan operasinya berada pada institusi intelijen seperti Badan Inteljen Nasional (BIN), Badan Inteljen Strategis (BAIS), bagian inteljen pada Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Polri serta institusi intelijen lainnya di jajaran pemerintahan. Ini jelas bisa kita lihat dan nilai bahwa ketahanan Negara Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak dalam maupun luar negeri belum teratasi oleh aparat negara. Kejadian ini seharusnya menjadi kerangka acuan bagi perbaikan, revitalisasi lembaga-lembaga intelijen pemerintah untuk berbenah.

Negara sudah seharusnya memberi perhatian yang cukup signifikan demi kemajuan dan keamanan wilayahnya. Agar tidak terjadi aksi teroris yang dapat mengancam tatanan Negara dan ideologi bangsa. Sehingga tercipta rasa aman tanpa kekerasan, dimana masyarakat bisa hidup berdampingan tanpa memandang suatu perbedaan.

#### **b. Adanya Paham Radikal**

Indonesia adalah negara yang kaya akan adat dan budaya. Dari masing-masing daerah dan pulau-pulau yang ada di Nusantara, masyarakatnya mempunyai suatu kepercayaan yang berbeda-beda pula. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia mengesahkan enam agama atau kepercayaan untuk dianut oleh masyarakatnya. Di mana masing-masing agama mempunyai ajaran yang baik tanpa kekerasan. Namun hal itu tidak menghilangkan paham-paham kekerasan timbul. Hal ini terbukti dengan adanya istilah Islam radikal dan paham wahabisme.

Misalnya saja paham radikal dan wahabisme yang dianut oleh sekelompok umat Islam yang lebih dikenal dengan istilah “Islam radikal” atau garis keras dan “Wahabisme” yaitu suatu paham yang menolak tasawuf, doktrin perantara, rasionalisme, dan

pandangan-pandangan yang berasal dari non Muslim.<sup>76</sup> Paham-paham ini menganggap hanya pandangan dan kepercayaanya mereka saja yang benar sedangkan pandangan orang lain dianggap salah.

Hal seperti inilah yang dianggap sudah sampai pada tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Sampai saat ini diyakini bahwa sumber teror berasal dari kelompok-kelompok tersebut, paling tidak ini didasarkan pada sumber-sumber resmi yang berkembang saat ini. Aksi atau kegiatan yang harus digaris bawahi dan digali lebih dalam, apakah mereka melakukan aksi teror secara sadar dan berdasarkan paham yang mereka yakini atau hanya sekedar menjalankan ajaran yang dipercayainya. Hal ini menjadi sangat penting bagi upaya pemerintah untuk mereduksi berkembangnya paham radikal dan wahabisme di kalangan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.

Faham radikal dan wahabisme saat ini lebih diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat muslim. Masyarakat muslim di Indonesia merupakan masyarakat mayoritas. Namun radikalisasi dan wahabisme ini bukan hanya terdapat pada masyarakat muslim saja, tetapi masyarakat non muslim pun ada yang menganutnya. Paham radikal dan wahabisme yang dianut oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia, dapat dikelola dan direduksi dengan baik bila pemerintah mampu mengembangkan tata kelola komunikasi sosial, mengembangkan toleransi dalam kerangka pluralitas dan kebhinekaan masyarakatnya.

Apreoritas bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi paham-paham tersebut, namun kerangka dialog saling pengertian dan mengembangkan kerangka non resiprokal dan tidak menarik jurang permusuhan menjadi penting untuk mereduksi paham-paham

---

<sup>76</sup> Hendropriyono, A.M. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam* (Jakarta: Kompas, 2009) h.258

kekerasan yang ada. Persaudaraan muslim yang erat justru menghilangkan fanatisme dan radikalitas, demikian juga semangat nasionalisme yang sehat memiliki akar yang sama dan menjadi tujuan bagi kemajuan suatu bangsa.<sup>77</sup>

**c. Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Nasional**

Stabilitas sosial politik negara Indonesia patut dipertanyakan. Setelah terjadi krisis berkepanjangan status sosial Negara sangat mempengaruhi gaya dan pola hidup masyarakat Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia tidak sedikit yang mengalami kesulitan ekonomi. Dari hal inilah banyak masyarakat yang berputus asa dan membawa mereka ke dunia kekerasan. Banyak kasus penjualan anak, prostitusi dan yang lebih mengerikan menjadi subyek gerakan terorisme hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Terorisme adalah salah satu paham kekerasan yang mencari orang-orang yang mau berkorban jiwa dan raganya kepada apa yang dipercayai dan dianggap benar oleh mereka. Hal ini dapat berlangsung terus disuatu negara, karena indikasi penurunan atau kegagalan pengelolaan stabilitas sosial politik pada sebuah pemerintahan merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya paham terorisme, atau gerakan spartisme lainnya.

Serangan teror dan tindak kekerasan tidak akan berkembang pada negara yang pemerintahnya mampu mengelola kondisi sosial politik dan keamanan secara stabil dan baik. Disamping itu negara Indonesia terindikasi menjadi pusat konflik dan kegiatan perang inteljen asing yang merupakan representasi dari paham-paham yang saling berbenturan secara internasional. Serta dapat meluas dan berpotensi menjadi perang terbuka bila tidak segera direduksi dan diberantas oleh pemerintah.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h.260

Bagaimanapun juga Teror Bom Marriot II hanya merupakan salah satu rentetan kejadian kekerasan, yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Yang memiliki nuansa sama dengan berbagai tindakan pengeboman yang pernah terjadi sebelumnya dengan indikasi-indikasi dan motivasi yang telah diketahui. Dari kejadian-kejadian inilah, bisa kita simpulkan bahwa kondisi sosial dan politik negara Indonesia sangatlah lemah dan perlu diperbaiki tatanannya. Sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia ikut berperan dalam aksi-aksi teroris.

#### **d. Pendidikan**

Pada umumnya pendidikan dibagi menjadi tiga macam yaitu: pendidikan formal, informal dan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diberikan di dunia pendidikan seperti di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru untuk mengarahkan siswanya ke hal-hal yang baik dan positif, pendidikan informal adalah pendidikan yang didapat dari dalam keluarga dari sejak lahir. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang didapat oleh anak dari lingkungan masyarakat. Ketiga pendidikan ini saling bergantung karena saling mempengaruhi perkembangan atau pembentukan karakter anak didik atau siswa.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai misi pendidikan yang intelektual, tetapi mewajibkan anak didiknya mempelajari nilai dan norma dari sebuah agama yang dipercayainya, dan mewajibkan penduduknya untuk memeluk satu dari enam agama yang diakui oleh negara. Hal ini ditujukan agar perbedaan dari ras, budaya dapat terkemas menjadi kebhinekaan. Namun kurangnya pendidikan sering menyalah artikan, sehingga tidak sedikit orang yang mempunyai pandangan salah terhadap suatu kepercayaan, yang menyebabkan orang mempunyai fanatisme berlebihan dan berujung pada paham-paham kekerasan seperti terorisme.

#### **e. Ketahanan Nasional**



Setiap negara memiliki ciri khas dan konstelasinya masing-masing, baik menyangkut struktur geopolitiknya, susunan penduduk serta kebudayaannya. Negara Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang khas didunia, karena penduduknya terdiri dari berbagai macam suku, ras, golongan, dan agama. Selain itu letak geografisnya yang sangat sepesifik, Indonesia dianggap negara yang tepat untuk melakukan aksi teroris. Sehingga tidak sedikit paham kekerasan muncul di Indonesia dan berkembang. Dimana sikap masyarakat yang sedikit acuh dengan kedatangan orang asing, memudahkan paham-paham ini tumbuh dan berkembang tanpa mudah dideteksi oleh aparat keamanan negara. Dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri, Indonesia memiliki suatu konsepsi ketahanan nasional yang memadai dan kuat.

Bagi terorisme tidak ada matahari kembar, salah satu harus dihancurkan. Meniadakan pihak lain adalah tujuan atau hakikat dari terorisme. karena itulah, terorisme merupakan ancaman ketahanan nasional suatu bangsa, ketahanan ideologi, ketahanan politik, atau ketahanan pertahanan dan keamanan, melainkan lebih dahsyat lagi merupakan ancaman terhadap kemanusiaan dimuka bumi ini.

Istilah ketahanan nasional mulai dikenal dan digunakan pada permulaan tahun 1960, yang dikemukakan oleh presiden pertama republik Indonesia bapak Ir. Soekarno. Dan pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di sekolah staf dan komando Angkatan Darat.

Lebih mendalam pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Baik yang langsung maupun tidak langsung yang

membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup suatu bangsa.

Konsepsi ketahanan nasional bertumpu pada kekuatan fisik militer dan politik kekuasaannya. Dengan demikian, jelas bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan mempergunakan baik pendekatan kesejahteraan, maupun pendekatan keamanan kehidupan nasional. Menurut buku terorisme kehidupan nasional dibagi menjadi beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- 1) Aspek alamiah yaitu meliputi; letak geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk.
- 2) Aspek kemasyarakatan yang meliputi; Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.<sup>78</sup>

Unsur-unsur tersebut yang meliputi almiyah karena jumlahnya tiga, maka disebut dengan tri gatra; sedangkan aspek kemasyarakatan dinamakan panca gatra, karena jumlahnya lima. Keseluruhan unsur secara sistematis yang membagi kehidupan nasional dalam delapan aspek atau asta gatra. Konsepsi ketahanan nasional tidak memandang salah satu aspek diatas, tetapi lebih menyikapinya satu sama lain karena aspek-aspek itu berhubungan erat satu sama lain. Sedangkan keseluruhan merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional.

Bagi bangsa Indonesia bahaya yang mengancam dapat berupa subversi dan infiltrasi terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Serta adanya kelemahan-kelemahan yang intern dari ketahanan nasional yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi faktor utama, yang sangat rawan terhadap ancaman terorisme

---

<sup>78</sup> *Ibid* , h267



### BAB III TERORISME DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Dasar Hukum Larangan Terorisme

##### 1. Dalam Pandangan Hukum Islam

Teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, dalam usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Dan Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Sedangkan Terorisme adalah setiap perbuatan berupa aksi-aksi kekerasan atau memberi ancaman dengannya, apapun pemicu dan maksudnya. Istilah terorisme juga biasa disebut *irhab*, irhab termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang di jelaskan sangsinya dalam syari'at, seperti kejahatan pencurian, penghancuran, perampokan, perzinahan, kemurtadan, di samping pembunuhan dengan sengaja, kejahatan terhadap anggota badan yang menyebabkan cacat, dan kejahatan-kejahatan lain. Hukum terorisme adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia, atau membuat mereka takut, atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan atau keamanan mereka, atau melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan (umum atau khusus), atau menduduki maupun menguasainya, atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya/aset negara.<sup>79</sup>

Dalam pandangan Hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak semua aksi yang menimbulkan ketakutan dan kengerian terlarang, tentunya yang dibarengi dengan kemampuan dan kekuatan yang memadai sehingga dapat menampilkan misi risalah tanpa

---

<sup>79</sup> Dzulkarnain M Sunusi, *antara jihad dan terorisme* (Makassar: PT. Ustaka Assunnah, 2011), h.129

mencederai dan melukai sasaran. Sebab, dalam pandangan Islam, menyebarkan risalah Islam adalah sebuah keharusan, demikian pula memelihara simbol-simbol keagamaan. Itu tidak dapat terlaksana tanpa kekuatan dan kemajuan yang menggentarkan lawan/musuh sehingga tidak menyerang. Dengan pengertian ini, memiliki kekuatan untuk 'menggentarkan' lawan demi tersebarnya risalah kedamaian adalah sebuah keharusan. Sebaliknya, aksi teror yang menimbulkan kengerian dengan menggunakan cara-cara yang salah, merusak fasilitas umum, mengancam jiwa manusia tak berdosa, mengganggu stabilitas negara dan lainnya tertolak dalam pandangan Islam.<sup>80</sup>

Pandangan Hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ  
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara

<sup>80</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Jihad*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka,2010),h.885

*kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(Al-Maidah: 32).<sup>81</sup>*

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl :90).<sup>82</sup>

Adapun hukum islam terhadap pelaku terorisme sangatlah keras dan tegas, hasil putusan majelis Haii'ah Kibar 'Ulama' (Lembaga Ulama Besar) Arab Saudi Nomor 148 Tanggal 12/1/1409 H (9/5/1998 M) berdasarkan bukti-bukti yang kuat berkaitan dengan banyaknya aksi-aksi perusakan yang telah menelan korban yang sangat banyak dari kalangan orang-orang yang tidak berdosa, dan dikarenakan oleh aksi tersebut, telah rusak (sesuatu

<sup>81</sup> *Ibid*, h.354

<sup>82</sup> *Ibid*, h.458

yang) banyak berupa harta benda hak-hak milik dan fasilitas-fasilitas umum, baik di negeri-negeri islam maupun di negeri lain. Majelis sepakat memutuskan (beberapa hal) sebagai berikut:

- a. Siapa saja yang terbukti secara syar'i melakukan suatu perbuatan diantara berbagai perbuatan terorisme, membuat kerusakan di beberapa bumi yang menyebabkan gangguan keamanan, dan menganiaya jiwa-jiwa dan harta benda, baik milik khusus maupun milik umum, hukumannya adalah dibunuh.
- b. Sebelum menjatuhkan hukuman, (pihak berwajib) harus menyempurnakan urusan, administrasi pembuktian yang lazim di pengadilan syari'at untuk mempertanggung jawabkan di hadapan Allah, dan pihak yang berwajib harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena berhubungan dengan nyawa.
- c. Majelis memandang perlunya memberitahukan hukuman ini melalui media masa.<sup>83</sup>
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.3 tahun 2004 yaitu:
  - 1.) Terorisme telah mene-nuhi unsur tindak pidana (jarimah) hirabah dalam khazanah fiqih Islam. Para fuqaha mendefinisikan al-muharib (pelaku hirabah) dengan: "Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)."
  - 2.) Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
  - 3.) Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI,

---

<sup>83</sup> Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa MUI* (jakarta: Erlangga, 2011) hlm, 76.

tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

## 2. Dalam Pandangan Hukum Positif

Sanksi hukum positif yang ada di Indonesia bagi para teroris, diantaranya terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme junto Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme junto Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for Supression of The Financing of Terorisme*.
- c. Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Selain itu teroris juga memiliki delik-delik tersendiri. Secara garis besar, bentuk-bentuk delik Terorisme dapat dibagi sebagaimana berikut:

- a. *Irrational Terrorism*: Teroris yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya salvation (pengorbanan diri) dan madness (kegilaan).



- b. *Criminal Terrorism*: Teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan dalam jenis ini. Termasuk juga dalam kegiatan kelompok bermotifkan revenge (balas dendam).
- c. *Political Terrorism*: Teror bermotifkan politik, batasan mengenai political terror sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan.
- d. *State Terrorism*: Istilah state terrorism ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan, serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara, termasuk penegak hukum. Teror oleh atau penguasa negara, misalnya saja penculikan aktivis.<sup>84</sup>

## **B. Pemberantasan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme, dinyatakan terorisme bersifat Internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga Pemerintah dan Bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlihat dalam penjelasan tersebut, pemerintah Indonesia menyadari terorisme telah menjadi isu internasional dan juga terlihat negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Assegaf, Nurcahaya Tandang, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional* (Penerbit Ombak, Jogjakarta, 2004) h. 287

<sup>85</sup> Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Cet ke.2 (Refika Aditama, Bandung, 2011): h.2

Kehadiran simpatisan Negara Islam di Irak dan [Suriah](#) di Indonesia menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan terorisme. Hingga kini, seakan tidak memiliki taji, lembaga penegak hukum masih mencari cara untuk mencegah penyebaran paham radikal yang disebarkan oleh organisasi radikal pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi.

Pangkal penyebabnya belum ada regulasi jelas yang dapat menghukum simpatisan yang secara terang-terangan mendukung NIIS dan berniat bergabung dengan milisi itu atau bahkan menggunakan berbagai atribut NIIS. Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, upaya pencegahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak menyebutkan tindakan seseorang yang mendukung dan mengajak orang lain untuk bergabung dengan gerakan radikal seperti NIIS, termasuk tindakan pidana.

Pada konsiderans Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, bagian menimbang, dijelaskan terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah pemberantasan. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme, sehingga Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini mutlak diperlukan. Tujuan utama lahirnya undang-undang ini adalah menjadikan terorisme sebagai suatu tindak pidana di Indonesia. Agar kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur tindak pidana dan subjeknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk hukum Indonesia yang isinya dibentuk oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, sehingga KUHP yang ada

saat ini tidak lain adalah hasil alih bahasa yang dilakukan beberapa sarjana Indonesia.<sup>86</sup>

Jika melihat judul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat suatu istilah yang menunjukan, peristiwa terorisme merupakan kejahatan, yakni istilah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *strafbaar feit* tersebut.<sup>87</sup>

Kemudian Van Hattum berpendapat, *strafbaar feit* adalah tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Kedua ahli tersebut merujuk penggunaan istilah tindak pidana dalam merumuskan *strafbaar feit*. Berbeda dengan kedua ahli tersebut, Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dari uraian tersebut terlihat Moeljatno merujuk istilah “perbuatan pidana” untuk merumuskan *strafbaar feit*.<sup>88</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu simpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut.

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan).
3. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras.

Jika ingin mengklasifikasikan terorisme sebagai tindak pidana, maka unsur tersebut harus melekat dalam tindakan terorisme. Unsur yang pertama yaitu melawan hukum. Unsur

---

<sup>86</sup> Moeljanto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, cet. 21 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).h.128

<sup>87</sup> S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 2003) h. 204.

<sup>88</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2000), h. 172.

melawan hukum dapat memiliki dua pengertian, yang pertama dalam artian melawan hukum secara formal yaitu, melakukan sesuatu terbatas pada yang dilarang oleh undang-undang.<sup>89</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara materil adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis. Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Apabila dalam suatu Pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka Penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.

Unsur yang kedua, yaitu unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan dipersamakan artinya dengan kesengajaan (*opzet*) atau kehendak (*voornawen*). *Geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan), ini berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian. Dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui: *willen en wetens*), sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*.<sup>90</sup> *Culpa* sendiri berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan. Unsur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan

---

<sup>89</sup> J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan (tanpa tempat: Bina Cipta, 2004), h. 102-103.

<sup>90</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 173.

sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembeda maupun dasar pemaaf.

Pada awalnya dalam hukum pidana, yang dianggap sebagai subjek tindak pidana hanyalah manusia sebagai *natuurlijke- personen*, sedangkan badan hukum atau *rechts-persoonen* tidak dianggap sebagai subjek.<sup>91</sup> Meskipun demikian, pada perkembangannya terjadi perluasan terhadap subjek tindak pidana. Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering memperhitungkan kenyataan manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya, muncul sebagai satu kesatuan dan karena dari itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/korporasi.<sup>92</sup> Dengan demikian, dalam hukum pidana saat ini subjek hukumnya tidak lagi terbatas pada manusia sebagai pribadi kodrati (*natuurlijke-persoonen*) tetapi juga mencakup manusia sebagai badan hukum (*rechts-persoonen*).

Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Artinya, barangsiapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab, sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana. Selanjutnya, dalam pidana dikenal juga adanya konsep penyertaan (*deelneming*). Konsep penyertaan ini berarti ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan atau melakukan tindak pidana.

Dalam hukum pidana ragam bentuk penyertaan diatur dalam Pasal 55-56 KUHP. Dalam KUHP terdapat terdapat empat bentuk penyertaan, yaitu sebagai berikut.

1. Mereka yang melakukan (*dader*). Satu orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai

---

<sup>91</sup> Sianturi, *op. cit.*, h. 192

<sup>92</sup> Remmelink, *op. cit.*, h. 97.

atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan, dimana masing-masing pihak berdiri sendiri dan masing-masing pihak memenuhi seluruh unsur.<sup>93</sup>

2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam bentuk menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Pada prinsipnya, orang yang mau disuruh melakukan tindak pidana adalah orang-orang tidak normal, yaitu anak-anak dan orang gila. Namun, menurut doktrin, orang yang berada dibawah ancaman atau kekerasan (ada dasar penghapusan pidana) juga masuk dalam golongan tidak normal. Yang bisa dipidana hanyalah orang yang menyuruh, karena yang mempunyai niat adalah orang yang menyuruh; walaupun yang memenuhi unsur tindak pidana adalah orang yang disuruh. Jadi, walaupun ada dua pihak yang menyebabkan terjadinya delik, yang dimintai pertanggungjawaban adalah yang menyuruh.<sup>94</sup>
3. Mereka yang turut serta (*medeplegen*) adalah seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan.<sup>95</sup> Pihak yang terlibat adalah satu pihak, yang dapat terdiri dari banyak orang, niat dimiliki semua orang dalam pihak tersebut, yang memenuhi unsur, pendapat pertama menyatakan cukup salah satu orang saja yang memenuhi unsur lalu semuanya dianggap memenuhi unsur pula. Pendapat kedua menyatakan tindakan berbeda yang dilakukan

---

<sup>93</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP* (Bandung: Alumni, 2001), hlm 39.

<sup>94</sup> Sianturi, *op. cit.*, h. 342.

<sup>95</sup> Lamintang, *op. cit.*, h. 588-589.

orang-orang itu jika digabungkan menjadi memenuhi unsur. Pertanggungjawaban pidana dipegang oleh semuanya. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan bersama-sama secara sadar dan secara kerjasama fisik.<sup>96</sup>

4. Penggerakan (*uitlokking*). Penggerakan atau dikenal juga sebagai *Uitlokking* diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-2.

---

<sup>96</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *op. cit.*, h.40

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**C. Analisis Politik Hukum Islam**  
**Terhadap Undang-Undang Nomor 15**  
**Tahun 2003 Tentang Pemberantasan**  
**Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme dalam pandangan hukum Islam adalah haram karena merupakan hal yang melenceng dari agama Islam itu sendiri. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam didalam kehidupan manusia sebagai rahmat dan kenikmatan yang besar bagi manusia bukan suatu musibah yang membawa malapetaka.

Didukung oleh berdirinya gerakan-gerakan Islam khususnya di Indonesia sendiri yang bersifat radikal yang ingin mendirikan suatu negara Islam dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam sehingga mereka biasanya bertindak kasar dan melakukan aksi teror dalam mencapai tujuannya tersebut. Para teroris tersebut melakukan aksi terornya mengatasmakan Islam sebagai jihad. Namun pengertian jihad sendiri dalam Islam bukanlah memerangi umatnya sendiri yang justru menghancurkan dan merusak tetapi jihad dalam Islam adalah upaya mengerahkan segala jiwa raga atas nama Allah sesuai ketentuan-ketentuan yang diajarkan dalam syari'at Islam. Praktik jihad yang diajarkan nabi dalam peperangan bukan hanya untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan musuh. Tetapi untuk sesuatu yang mulia dan juga mendatangkan manfaat bagi manusia. Dalam Islam, peperangan hanya diizinkan dalam kondisi seperti: sebagai langkah bertahan (defensif) untuk melindungi kaum muslim.<sup>97</sup>

Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana internasional, tindak pidana teroris menjadi materi diskusi yang cukup menarik. Hampir semua ahli hukum pidana dan

---

<sup>97</sup> Fealy, Greg, Antony Bubalo. *Jejak kafilah: pengaruh radikalisme timur tengah di Indonesia*. 2005. Bandung : Mizan h.127



kriminolog mengatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan *extraordinary crime* dan proses peradilannya pun berbeda dengan tindak pidana biasa. Karena sifatnya yang *extraordinary crime* inilah hampir semua negara menggunakan undang-undang khusus dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Akan tetapi, Kent Roach (Canada), Adnan Buyung Nasution dan beberapa ahli hukum pidana dan HAM (antara lain, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil) menolak pandangan demikian.

Bagi mereka, terorisme merupakan tindak pidana biasa dan penanganannya pun cukup dengan aturan perundang-undang yang berlaku bagi tindak pidana lainnya. Dalam konteks sistem peradilan pidana cukup dengan ketentuan KUHP dan KUHP saja tidak perlu menggunakan UU Antiteroris atau yang lainnya seperti ISA (*Internal security act*).<sup>98</sup> Namun demikian, tidak dapat disanggah bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *mala per se* bukan termasuk *mala prohibita*. Hal ini karena terorisme merupakan *crime against conscience*, menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela. Di Indonesia penanganan perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini memberi petunjuk bagaimana menyelesaikan masalah tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Berikut akan diberikan uraian mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pembedaan pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## 1. Penyelidikan

Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

---

<sup>98</sup> Bari Muchtar, “Undang-Undang AntiTerorisme Sangat Mengkhawatirkan”. <http://www.rnw.nl>, diakses pada tanggal 8 Januari 2017

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah terorisme. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, maka proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku.<sup>99</sup> Hal ini berarti, bila tersangka tindak pidana terorisme adalah seorang sipil, maka akan berhadapan dengan Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim pada Peradilan Umum. Tetapi bila tersangka seorang militer, maka akan berhadapan dengan Peradilan Militer, Oditur Militer (Odmil), dan Hakim Militer. Bila para tersangka ada yang sipil dan juga ada militer, maka berlaku peradilan koneksitas. Pada peristiwa Bom Bali 2002 yang kemudian diikuti dengan aksi-aksi teror lainnya, para tersangka pemboman dan teror-teror tersebut adalah orang sipil, sehingga ujung tombak pemberantasan pelaku teror ada pada pihak Polri. Menurut Pasal 13 ditegaskan bahwa perkara terorisme termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini didahulukan dari perkara pidana yang lain. Pasal 15 menentukan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan bagi tersangka perkara terorisme berlaku sistem inquisitor. Yang dimaksud dengan sistem inquisitor adalah suatu cara yang memperlakukan tersangka sebagai obyek pemeriksaan dan bukan sebagai pihak sebagaimana dalam sistem *aquisitoir*. Disini tidak berlaku *adagium* praduga tak bersalah. Berdasarkan ketentuan bahwa pemeriksaan pendahuluan bagi tersangka perkara terorisme tidak

---

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) h. 39.

berlaku asas praduga tak bersalah, berarti bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana terorisme dianggap bersalah, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa ia tidak bersalah. Melalui cara pemeriksaan seperti ini diharapkan semua data dan fakta yang ada, dapat dijadikan objek penyelidikan oleh petugas, dalam rangka menemukan kebenaran. Guna keperluan penyelidikan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak terorisme untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 X 90 (tiga kali sembilan puluh) hari. Penahanan ini lebih lama dibandingkan penahanan tersangka tindak pidana selain terorisme yang memberi wewenang kepada petugas untuk menahan hanya selama 20 hari (Pasal 24 KUHAP). Jangka waktu yang lebih lama dalam menahan pelaku tindak pidana terorisme ini adalah agar dimiliki waktu yang cukup untuk menyelidiki dengan seksama data dan fakta yang berkaitan dengan terorisme yang dilakukannya. Selain itu, dalam tindak pidana terorisme biasanya melibatkan jaringan internasional yang bekerja dengan rapi, sehingga sulit untuk menelusurinya. Oleh karena itu diperlukan waktu penyelidikan yang lebih lama. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ada persamaan dan ada perbedaan antara penyelidikan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya. Perbedaan tersebut semata-mata karena tindak pidana ini membahayakan banyak orang dan dapat mengancam kedaulatan negara.

## **2. Penyidikan**

Setelah dilakukan penyelidikan atas seseorang atau sekelompok orang yang disangka melakukan tindak pidana terorisme, maka jika ditemukan indikasi yang kuat bahwa orang atau sekelompok orang itu memang teroris, dilakukanlah penyidikan. Penyidikan merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa Pasal 25 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada.<sup>100</sup>

Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi disini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan

---

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 48

terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya. Masih terdapat perbedaan pendapat diantara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi:

- a. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.
- b. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- d. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.<sup>101</sup>

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpangsiuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (*Hearing*) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen

---

<sup>101</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 90.

mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain manapun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi. Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Terutama karena ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah terlanggar, karena banyak Pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, dimana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa, akan tetapi juga terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa didalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror. Telah banyak negara-negara di dunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk

hak-hak yang digolongkan ke dalam *non-derogable rights*, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mengesahkan kesewenang-wenangan (*arbitrary detention*) pengingkaran terhadap prinsip *free and fair trial*.

Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Yang terpenting juga dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana terorisme adalah tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan dan penyiksaan tersangka.<sup>102</sup>

Penyiksaan terhadap tersangka, apapun alasannya adalah tidak dibenarkan, termasuk ia adalah teroris sekalipun. Hal ini ditegaskan dalam salah satu asas yang ditetapkan dalam penegakan hukum pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), yaitu suatu asas yang mengajarkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana harus selalu dianggap tidak bersalah sebelum kesalahan itu diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>102</sup> <http://www.detiknews.com>, "TPM: Pengakuan Amrozi Disiksa oleh Oknum Polisi", diakses pada tanggal 8 Januari 2017

Keberadaan asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi oleh polisi dan aparat penegak hukum lainnya, antara lain dengan cara tidak menyiksa orang yang disangka melakukan tindak pidana tertentu. Namun dalam prakteknya pelanggaran asas praduga tak bersalah sering terjadi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Sering terjadi ada pemukulan yang dilakukan oleh oknum polisi yang dilakukan terhadap tersangka yang tidak mau mengakui kesalahannya. Biasanya hal ini dilakukan pada waktu pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Karena adanya fenomena seperti ini, maka sering terdengar pula bahwa dalam proses persidangan ada tersangka atau terdakwa yang mencabut pengakuan kesalahannya, padahal di dalam BAP dikatakan bahwa ia mengakui kesalahannya. Ternyata setelah diusut pada waktu pembuatan BAP dilakukan penyiksaan fisik terhadap tersangka, sehingga tersangka terpaksa mengakui perbuatannya karena tidak tahan terhadap siksaan tersebut. Penyiksaan itupun dialami oleh tersangka kasus teror Bom Bali, yaitu Amrozi, Mukhlas dan Imam Samudera. Dalam hal ini tidak ada alasan pembenar apapun yang dapat digunakan oleh oknum yang telah melakukan penyiksaan fisik tersebut.<sup>103</sup>

### 3. Penuntutan

Aksi terorisme mengandung makna bahwa serangan-serangan yang dilakukan teroris tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Hal inilah yang terlintas di benak hampir setiap orang yang mendengar kata teroris. Pembalasan yang kejam tersebut secara hukum dilakukan pada saat tahap penuntutan. Namun demikian secara hukum, penuntutan dilakukan bukan untuk balas dendam atas kejahatan teroris, tetapi untuk memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut terpenuhi bukan hanya karena

---

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 96



hukuman harus setinggi-tingginya atau seberat-beratnya, tetapi disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam prakteknya, tidak banyak teroris yang sampai di pengadilan, karena kebanyakan dari mereka tidak tersentuh hukum (*untouchables*) karena organisasi mereka yang rapi. Banyak kejadian yang berindikasi terorisme tetapi pelakunya tetap tidak dapat dibawa ke pengadilan.<sup>104</sup>

Sebagai contoh pada peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon.

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung *World Trade Center* dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam masa dua jam itu tak lain adalah kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan

---

<sup>104</sup> M. Yahya Harahap, *ibid.*, h. 80-90.

kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia. Amerika Serikat menduga Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut. Namun sampai sekarang, Osama bin Laden belum berhasil ditemukan, sehingga tidak dapat dimintai keterangan, dan dituntut jika memang ia terbukti bersalah. Namun tidak demikian halnya dengan pelaku Bom Bali. Pelakunya dapat ditangkap dan dituntut di muka persidangan. Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Atas tragedi tersebut, Amerika langsung mengecam keras dan meminta pemerintah Indonesia segera mencari dan menghukum pelakunya.<sup>105</sup>

Guna memayungi secara hukum langkah-langkah yang diambil guna mencari pelaku Bom Bali, pemerintah segera membuat parameter hukum dan perundang-undangan mengenai terorisme yang dituangkan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kedua Perpu itu ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2002, hanya enam hari setelah peristiwa pengeboman terjadi agar para teroris pelaku pengeboman segera dapat diadili.

Sehubungan dengan diterapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Pemerintah menegaskan bahwa PERPPU ini dirumuskan dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana telah menjadi komitmen pemerintah, pemerintah berusaha sekeras-kerasnya agar dalam penerapannya nanti tidak terjadi berbagai ekses yang mengarah kepada pelanggaran hak

---

<sup>105</sup> M. Yahya Harahap, *ibid.*, h. 97.

asasi manusia, apalagi sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Mungkin saja ada hak asasi manusia yang berkurang dengan penerapan PERPPU ini, tetapi semua itu ditujukan dengan niat untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam ruang lingkup yang lebih besar, termasuk keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara. Dalam Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak-hak Sosial dan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa hal seperti itu memang dimungkinkan untuk dilakukan. Ibarat dokter yang terpaksa harus mengoperasi pasien, maka tentu tindakan itu akan menimbulkan rasa sakit pada pasien itu. Namun rasa sakit akibat operasi itu dimaksudkan untuk menyelamatkan pasien dari bahaya yang lebih besar, yakni kemungkinan meninggalnya pasien itu akibat penyakit yang dideritanya.

Dikeluarkannya Perpu ini juga tidak dimaksudkan untuk ditujukan kepada orang per orang atau kelompok tertentu dalam masyarakat, tetapi ditujukan kepada siapa saja yang menjadi pelaku atau terkait dengan tindak pidana terorisme. Adalah keliru anggapan sebagian besar warga masyarakat yang menyatakan PERPPU ini sengaja diciptakan untuk menangkapi tokoh-tokoh Islam “garis keras”. Pemerintah sangat menghormati dan menjunjung tinggi Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebebasan menjalankan agama bukan saja dijamin, tetapi juga dilindungi oleh negara. Tidak mungkin pemerintah akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan mayoritas penduduk negaranya.

Dalam pelaksanaannya kemudian pemerintah memandang perlu untuk menetapkan Perpu anti terorisme menjadi sebuah undang-undang. Untuk itu pemerintah meminta DPR agar secepatnya bersidang untuk memodifikasi dan menyempurnakan kedua Perpu anti terorisme sebelum dijadikan Undang-Undang pemberantasan terorisme. Pemerintah juga membentuk

sebuah *desk* (lembaga) yang merupakan fasilitas staf dan bersifat nonstruktural di bawah Menko Polkam. Namanya *Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)*. *Desk* ini akan melakukan koordinasi pekerjaan berbagai departemen yang terkait agar lebih efisien dan terfokus dalam menangkap, mencegah dan menanggulangi terorisme. Koordinasi DKPT meliputi koordinasi intelijen, penegakan hukum, kerja sama internasional, informasi dan hubungan masyarakat serta perencanaan dan evaluasi. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi publik, pemerintah membuka sebuah *home page* di internet agar publik dapat mengikuti apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan pemerintah dalam memerangi terorisme.<sup>37</sup> Dengan adanya langkah-langkah yang telah dirumuskan di atas, pemerintah bersama-sama dengan TNI dan Polri bekerja keras untuk menyingkap siapa pelaku di balik tragedi bom Bali. Dalam kaitan dengan keinginan untuk menetapkan Perpu anti terorisme menjadi Undang-undang maka pada tanggal 4 April 2003 kedua Perpu anti terorisme itu telah disahkan dalam bentuk Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang.<sup>106</sup>

Dengan telah dilakukannya perubahan Perpu anti terorisme menjadi Undang-undang, maka semakin jelas dasar hukum yang digunakan untuk mengadili para pelaku pengeboman di Bali. Penangkapan pelaku pengeboman ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk memulihkan kepercayaan internasional bahwa Bali aman. Langkah ini harus dilakukan mengingat Bali selama ini adalah salah satu daerah tujuan wisata

---

<sup>106</sup> M. Yahya Harahap, *ibid.*, h. 102.

yang telah terkenal ke seluruh manca negara dapat menjadi menurun citranya dengan adanya terorisme internasional. Demikianlah berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, maka dilakukan penuntutan terhadap ketiga terdakwa pelaku Bom Bali, yaitu Amrozi, Abdul Azis alias Imam Samudera, dan Ali Ghufron alias Mukhlas. Penuntutan dilakukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum yang diketuai oleh Jaksa Urip Tri Gunawan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, pada tanggal 30 Juni 2003. Tuntutan yang diberikan terhadap pelaku Bom Bali tersebut adalah hukuman mati.

#### **4. Persidangan**

Pada dasarnya pelaksanaan persidangan untuk kasus terorisme sama saja dengan pelaksanaan persidangan untuk kasus tindak pidana lainnya. Semuanya harus sesuai dengan KUHAP, kecuali ditentukan lain. Salah satu perbedaan antara persidangan untuk tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya adalah adanya kewenangan hakim untuk melakukan proses pra-ajudikasi (proses peradilan sebelum sidang pengadilan). Wewenang ini diberikan Pasal 26 ayat (2) dan penjelasan umum Undang-Undang Antiterorisme. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Antiterorisme menyebutkan bahwa “Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri”. Sedangkan dalam ayat (4) di jelaskan bahwa : “Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.” Ketentuan Pasal 26 tersebut di atas dengan jelas memberikan kewenangan kepada Pengadilan dalam hal

ini Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam proses pra-ajudikasi. Akan tetapi keterlibatan pengadilan tersebut hanya sebatas pada pemeriksaan terhadap informasi intelijen (pasal 26 ayat (1) dan (2)). Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa: “(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.” Politik hukum pidana dengan menggunakan istilah “dapat menggunakan” dalam ayat (1) tersebut memberikan kemungkinan kepada Kepolisian menggunakan sumber, data, atau laporan lain untuk digunakan sebagai bukti awal yang kuat untuk menduga dan/atau melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Konsekuensi logis yang mungkin timbul dalam masalah tersebut adalah “pengingkaran” sumber informasi apabila terdapat gugatan praperadilan dari tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya.<sup>107</sup>

Selain masalah pra-ajudikasi di atas, semua proses persidangan dalam kasus tindak pidana terorisme adalah sama. Dalam persidangan pertama terhadap terdakwa biasanya materi pertama adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang selanjutnya adalah pembacaan eksepsi yaitu tanggapan dan atau keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan begitu seterusnya sampai dianggap cukup, maka hakim menginjak materi selanjutnya yaitu menyangkut pemeriksaan barang bukti dan berakhir dengan penjatuhan vonis oleh hakim. Pada dasarnya persidangan berfungsi untuk mengungkap dan memeriksa fakta-fakta yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perkara yang dituduhkan kepada terdakwa. Fakta-fakta ini dapat berasal dari keterangan saksi yang disinkronkan dengan keterangan terdakwa. Dalam persidangan kasus Bom Bali yang telah lalu terhadap terdakwa Amrozi dapat diketahui fakta

---

<sup>107</sup> M. Yahya Harahap, *ibid.*, h. 105-106

bahwa selain melakukan Bom Bali, Amrozi juga menjadi pelaku pengeboman malam natal di Jawa Timur. Pengeboman gereja di Jawa Timur ini dilakukan Amrozi atas perintah dari Hambali, yang juga merupakan salah satu teroris. Perintah itu diberikan Hambali dalam pertemuan di Hotel Mesir Surabaya. Hambali meminta Amrozi membuat pemanasan di gereja-gereja pada malam Natal 2000. Kemudian Amrozi memesan barang-barang bahan-bahan bom dengan sasaran gereja di Mojokerto bersama Ali Imron dan Ali Fauzi. Semua biaya pengeboman diberikan Hambali. Amrozi mengaku keinginan melakukan pengeboman itu atas keinginannya sendiri karena kecocokan misi. Namun Amrozi hanya disuruh Hambali untuk mengurus wilayah di Jawa Timur saja.<sup>108</sup>

Dalam sidang juga terungkap bahwa Amrozi mengaku mengenal Ba'asyir di Malaysia pada 1996-1997. Waktu itu, Ba'asyir datang ke pondok pesantren Lukmanul Hakim yang dikelola oleh kakak Amrozi, Ali Ghufron. Amrozi sendiri berada di Malaysia sejak 1982. Pada 1991 ia kembali ke Indonesia karena izin paspornya habis. Selain itu, pertemuan Amrozi dengan Ba'asyir terjadi saat Amrozi datang ke pondok pesantren Ngruki, Sukoharjo usai pertemuan di Malaysia. Amrozi saat itu mengantar Ustad Zakaria, pimpinan pondok pesantren Al Islam, Solokuro, Lamongan guna meminta Ba'asyir memberikan pembekalan terhadap murid-murid Al Islam yang baru lulus. Namun dalam persidangan, Amrozi menentang tuduhan yang diberikan kepada Abu Bakar Ba'asyir sebagai orang yang menyuruh melakukan Bom Bali. Hal ini meringankan Ustad Abu Bakar Ba'asyir yang telah dipenjara selama dua tahun tanpa pernah terbukti bahwa ia adalah orang yang menyuruh melakukan teror Bom Bali. Selama persidangan Amrozi justru banyak mencabut keterangannya dalam berita acara

---

<sup>108</sup> <http://www.kompas.com>., "Pemerintah Sahkan PERPPU Anti Teroris", diakses pada tanggal 5 Januari 2017.

pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Polri. Alasannya, ia merasa tertekan saat menyaksikan Ghuftron disiksa penyidik Mabes Polri. Ghuftron waktu itu disiram air panas di sekujur tubuhnya. Bahkan, kemaluan Ghuftron dipukuli oleh sekitar 13 orang polisi. "Kalau kamu tak mengakui keterlibatan Ba'asyir kamu akan disiksa lebih parah dari kakakmu," kata Amrozi mengungkapkan intimidasi dan penyiksaan yang dilakukan selama pemeriksaan oleh polisi. Pengakuan Amrozi bahwa dirinya dan kakaknya Ali Gufron (Mukhlis) disiksa oleh polisi, tidak diakui oleh Mabes Polri. Bantahan tersebut disampaikan Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Zainuri Lubis kepada wartawan di kantornya, pada tanggal 18 Juni 2003.

Selain mengungkap masalah penyiksaan yang menimpa dirinya, dalam persidangan, Amrozi juga mengaku menyediakan bahan-bahan peledak dalam kasus peledakan bom di kediaman Kedubes Filipina di Jakarta. Sedangkan peledakan bom dilakukan oleh Faturrahman Al Ghazi. Pertemuan antara kedua orang itu dilakukan di kediaman Al Ghazi di Madiun. Menurut Amrozi, bahan-bahan bom untuk meledakkan rumah Kedubes Filipina di Jakarta dipesan kepada dirinya. Amrozi sendiri memiliki bahan-bahan bom itu karena mempunyai banyak sekali stok bahan pembuat bom itu, setelah sebelumnya membeli dari toko Tidar Kimia di Surabaya. Amrozi juga mengaku membeli alat-alat lainnya seperti mobil Suzuki Carry warna merah yang digunakan untuk meledakkan rumah Kedubes Filipina tersebut. Mobil itu diserahkan Amrozi kepada Dulmatin di sebuah rumah di Pondok Bambu. Amrozi baru tahu kalau mobil tersebut untuk meledakkan kediaman Kedubes Filipina dari TV setelah melihat nomor mesin. Amrozi mencocokkan nomor mesin mobil yang digunakan untuk mengebom tersebut dengan BPKB. Namun ketika ditanya jaksa penuntut umum tentang keberadaan BPKB tersebut, dijawab Amrozi sudah dihancurkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Amrozi tidak hanya menjadi pelaku Bom



Bali, tetapi juga bom natal di Jawa Timur dan juga *pen-supply* barang dalam peristiwa pengeboman kediaman Kedubes Filipina di Jakarta. Terungkapnya fakta-fakta itu di persidangan membuat Amrozi, Imam Samudera, dan Mukhlis dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Made Karna Parna SH dalam sidang tanggal 7 Agustus 2003 di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.<sup>109</sup>

#### **D. Kendala-dan Solusi Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Peran Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedi ledakan bom belum lama ini menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak. Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak faktor yang menyebabkan terorisme dapat terus berkembang. Dari faktor perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris. Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan pariwisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya.

---

<sup>109</sup> <http://karodalnet.blogspot.com>, "Kronologi Amrozi Cs Menuju Tembak Mati", diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional, meskipun pascapenangkapan Dr. Azhari dan sejumlah tokoh utama kelompok Jamaah Islamiyah (JI), aksi-aksi terror dari kelompok tersebut cenderung menurun. Hal ini dibuktikan dalam kurun waktu hampir 5 tahun tidak ada aksi terror bom yang berdampak nasional maupun internasional. Demikian juga pelaksanaan eksekusi mati terhadap 3 terpidana kasus bom Bali (Amrozi, Ali Gufon, dan Imam Samudera) yang dikhawatirkan akan ada reaksi balas dendam dari kelompok radikal tersebut, ternyata tidak sampai menjadi kenyataan. Namun dengan adanya peledakan bom di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton yang menelan korban 9 orang dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa kelompokkelompok teroris masih terus bekerja dan melanjutkan aksinya di Indonesia. Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.<sup>110</sup>

Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi anggota kelompok teroris. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat.

Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat. Jaringan teroris yang sulit

---

<sup>110</sup> I Made Karna, Catatan Seminar Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Juni 2004.

terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut.<sup>111</sup>

Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas institusi dan aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme dan skala ancaman yang semakin meningkat. Selanjutnya kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan media subur tumbuh dan berkembangnya sel-sel dan jaringan teroris, perlu menjadi perhatian utama pemerintah dengan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Solusi yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah;
2. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan;
3. Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme;
4. Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal,
5. Peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme;

---

<sup>111</sup> Bekto Suprpto, Pengalaman Investigasi Kasus Terorisme di Indonesia dan Permasalahannya, Seminar Penanganan Terorisme Reg Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Juni 2001.

6. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;
7. Pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah jihad yang selama ini “disalahartikan”. Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Di samping itu, diterapkannya strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah tertangkapnya pelaku terorisme, termasuk dua tokoh utamanya, Dr. Azahari dan Abu Dujana pada tahun 2005 dan 2007. Selanjutnya, pada tahun 2006 Polri berhasil melakukan penggerebekan tempat persembunyian anak buah Noordin M. Top di Wonosobo, yaitu Jabir, Abdul Hadi (kepercayaan dr. Azhari), Solehudin dan Mustarifin.

Pada tahun 2008 berbagai operasi yang dilakukan oleh densus 88 atau Bareskrim Polri berhasil menangkap 28 orang pelaku terorisme di Indonesia. Tahun 2009 Polri berhasil menangkap beberapa tersangka kelompok teroris di Palembang, Lampung dan Jawa Tengah yang diperkirakan terlibat dalam rencana aksi teroris di dalam negeri dan luar negeri. Tertangkapnya sebagian anggota jaringan teroris tersebut yang diperkirakan merupakan kelompok Noordin M. Top, menandakan bahwa tugas pemberantasan terorisme belum tuntas dan ke depan tetap memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Terbunuhnya seorang teroris yang diduga sebagai Nurdin M. Top dalam sebuah penyergapan di desa Beji Temanggung, merupakan kunci keberhasilan aparat keamanan dalam pengungkapan peledakan Hotel Ritz-Carlton dan J.W. Marriot tanggal 17 Juli 2009. Keberhasilan ini diharapkan sebagai rangkaian akhir penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu tertentu.<sup>112</sup>

Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada. Program pencegahan dan penanggulangan terorisme melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan seluruh komponen kekuatan bangsa dengan diadakannya pengembangan kapasitas berbagai instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan terorisme. Permasalahan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan (stake holder), baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, TNI dan Polri terus melakukan latihan gabungan mengingat pentingnya kerja sama TNI-Polri untuk terorisme. Untuk membantu

---

<sup>112</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron, dan Ali Imron alias Alik* ( Penerbit, Jambatan, Jakarta, 2007), h. 1.

penanganan kasus yang berhubungan dengan terorisme, Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik.

Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, Pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. Penertiban dan pengawasan juga akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Di samping itu, diselenggarakannya gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan penyebaran buku-buku terorisme dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah Pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia. Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama

internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*, hal. 75.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti sesama muslim hukumnya haram dan berdosa. Namun disisi lain Islam menjelaskan bahwa berjuang dalam membela agama hukumnya wajib meskipun nyawa menjadi taruhannya dan orang-orang yang mati dalam keadaan berperang membela Islam akan diberi imbalan masuk surga.
2. Kendala dalam proses penegakan hukum terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah akan bahayanya terorisme yang membahayakan nyawa rakyat Indonesia selain dari pada itu kendala dalam penegakan hukum terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu kurangnya persiapan intelegen, adanya paham radikal, kurangnya stabilitas social politik dan keamanan nasional, kurangnya wawasan dalam pendidikan, serta kurangnya ketahanan nasional. Adapun solusinya yaitu pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait dengan keselamatan nyawa rakyat Indonesia yang sewaktu-waktu bisa melayang akibat adanya serangan dari terorisme.

### **B. Saran**

Ditujukan untuk para aparat Negara agar lebih memperhatikan keamanan Negara dan memperkuat kesatuan antar warga Negara agar tidak ada lagi terorisme yang masuk dan merajalela di Indonesia.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Nasir. 2006. *Membongkar Jamaah Islamiyah, Pengakuan Mantan Anggota JI*. Jakarta.
- Abdul Wahid, dkk. 2011. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Cet ke.2. Bandung: Refika Aditama.
- Abdullah, Mudhofir. 2009. *Jihad Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Inti Media.
- Abimanyu, Bambang. 2006. *Teror Bom Azhari-Noor Din*. Jakarta: Republika.
- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tatanegara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* diterjemahkan oleh Abdul Hayye Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. cet ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amirsyah. 2012. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Andalas, Mutiara. “*Ekoteologi: Menebus Firdaus Dari Holocaust*”. *Majalah Basis* Nomor 03-04, Tahun ke-57.
- Arief , Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 1958. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Sidiqie, Hasbie. 1966. *Tafsir al-Bayan*. Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Assegaf, Nurcahaya Tandang. 2004. *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*. Yogyakarta: Ombak.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana*

*Internasional*. Bandung: PT Rafika Aditama.

- Aziz, Munawir. 2010. "*Relasi Islam-Terrorisme*; Subjek dan Objek", dalam Abdul Wachid (ed.), *Islam dan Terrorisme*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Azwar, Saifuddin. 2016. Cet ke 17. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- B.N. Marbun, 2003. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Brotowidjoyo, Mukayat. 2001. *Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Chalil, Moenawar. 2001. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilid I*. Jakarta: Gema Insani.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: Grafindo.
- Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Semarang: CV.Toha putra.
- Efendi, Erdianto. *HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Esposito, J.L., 1996. *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*. Edisi Revisi, Bandung : Mizan
- Fauzan Jamal, M.A. 2008. *Intelijen nabi: melacak jaringan intelijen militer dan sipil pada masa Rasulullah*. Jakarta: pustaka OASIS.
- Fealy, Greg, Antony Bubalo. 2005. *Jejak kafilah: pengaruh radikalisme timur tengah di Indonesia*. Bandung : Mizan.
- Firmansyah, Adhe SM. 2009. *Kartosoewirjo, Biografi Singkat*

1907-1962. Jogjakarta: Garasi.

H.A.K. Moch. Anwar. 2001. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Alumnus.

Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hendrojono. 2005. *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada.

Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam*. Jakarta: Kompas.

<http://karodanet.blogspot.com>, "Kronologi Amrozi Cs Menuju Tembak Mati"

[http://koran.republika.co.id/berita/82551/85\\_Ribu\\_Warga\\_Irak\\_Tewas\\_Akibat\\_Perang](http://koran.republika.co.id/berita/82551/85_Ribu_Warga_Irak_Tewas_Akibat_Perang)

<http://romain/newscatvideo/internasional/2009/12/31/96974/Video-Eksekusi-Saddam-Hussein-Marak>

<http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/02/siyasah-politik-islam.html>

<http://www.detiknews.com>, "TPM: Pengakuan Amrozi Disiksa oleh Oknum Polisi"

<http://www.kompas.com>., "Pemerintah Sahkan PERPPU Anti Teroris"

Ishak, Mohd. Said. 2003. *Hudud dalam Fiqh Islam*. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

J.L.Esposito. 2002. *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, Edisi Revisi. Bandung : Mizan.

- J.M.Van Bemmelen. 2004. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan. Bina Cipta.
- Karna, I Made. Catatan Seminar Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta.
- M Sunusi, Dzulkarnain. 2011. *antara jihad dan terorisme*. Makassar: PT. Ustaka Assunnah.
- Makaarim, Mufti, dan Wendy Andika Prajuli (eds). 2009. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Institut for Defence Security and Peace Studies (IDSPS).
- Moeljanto. 2001. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, cet. 21. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchtar, Bari. “Undang-Undang AntiTerorisme Sangat Mengkhawatirkan”. <http://www.rnw.nl> ,
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Pengadilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron, dan Ali Imron alias Alik*. Jakarta: Jambatan.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. Huntington, Samuel dalam tesisnya. 2002. *Clash of Civilization, Remaking of the World Order*. New York:Simon and Schuster.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Rösler-Garcia, ”Terorisme, Anak Kandung Ekstremisme”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/15/opini/tero30.htm>
- Pulungan, J. Suyuthi.1993. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Qardawi, Yusuf. 2010. *Fiqih Jihad*. Bandung: PT.Mizan Pustaka.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Riwayadi Susilo, T.t, 2011. *Kamus Lengkap*. Surabaya: Sinar Terang.
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 2003)
- Saiful Munjani, Jajat Burhanudin, dkk. 2005. *Benturan Peradaban, Sikap dan Perilaku Islam Indonesia terhadap Amerika Serikat*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. *Terorisme di Indonesia dalam tinjauan Psikologi*: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sunusi, Dzulqarnain Muhammad. 2011. *Antara Jihad dan Terorisme*. Makasar: Pustaka Assunah.
- Suprpto, Bekto. Pengalaman Investigasi Kasus Terorisme di Indonesia dan Permasalahannya, Seminar Penanganan Terorisme Reg Tindak Pidana Khusus, Jakarta
- Suradji, Adjie. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadi. 1980. *Kamus Baru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Taimiyyah, Ibnu. 1951. *As-Siyah Asyar'iyah*. Cairo.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulama, Majelis. 2011. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga.
- UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahid, Abdul, Sunardi. 2005. Muhamad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wilkinson, Paul. 2005. *Terrorism and the Liberal State* (London: The Macmillan Press Ltd., 1977), sebagaimana dikutip oleh F. Budi Hardiman dalam F. Budi Hardiman dkk., *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.